

RANCANGAN AKHIR

Perubahan RENSTRA 2022-2027

Rencana Strategis Perangkat Daerah



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjuk dan rida-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027.

Dinamika perekonomian makro global, ketidakpastian geopolitik, serta berbagai tantangan nyata sektor industri dan perdagangan baik lokal maupun nasional menjadi dasar restrukturisasi program pembangunan jangka menengah di DIY dalam dokumen perubahan renstra ini. Kehadiran dokumen ini menjadi instrumen penting agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih adaptif, tepat sasaran, serta memberikan dampak konkret yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

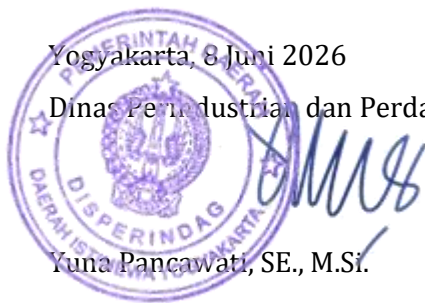
Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ini tidak hanya berpatokan pada arah kebijakan RPJMD DIY 2022–2027, namun juga diselaraskan secara harmonis dengan kebijakan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan RI. Komitmen mendukung pencapaian visi-misi Gubernur DIY dijabarkan secara terukur melalui program prioritas yang terintegrasi, dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah agar pelaku usaha industri dan perdagangan di DIY semakin tangguh, inovatif, serta memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Akhir kata, Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022–2027 ini diharapkan dapat menjadi kompas dan pedoman operasional utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akuntabel di lingkungan internal dinas.

Yogyakarta, 8 Juni 2026

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Yuna Pancawati, SE., M.Si.





BAB 1 PENDAHULUAN

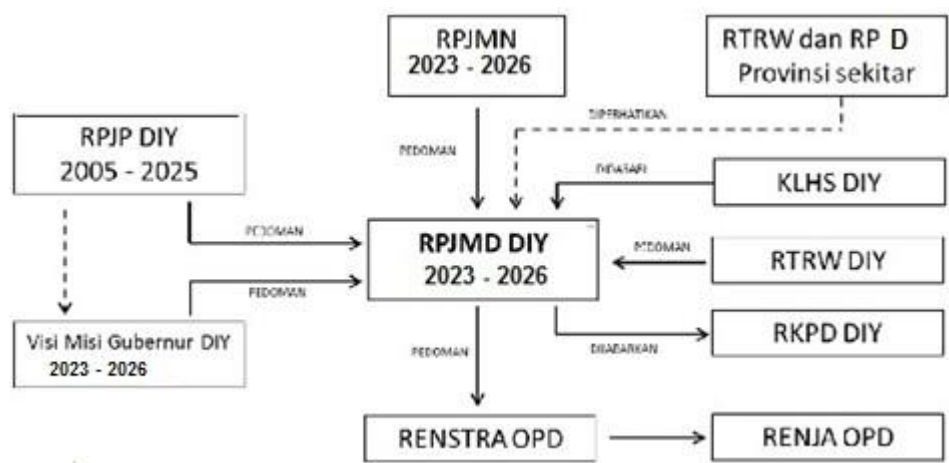
1.1 Latar Belakang

A. Regulasi, Definisi, dan Nilai Strategis Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY) dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Disperindag DIY mengemban tugas dan fungsi pokok untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Amanat regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan makro untuk periode 5 (lima) tahun. Secara definisi, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan operasional jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik tata kerja organisasi.

Nilai strategis dari Renstra Perangkat Daerah ini terletak pada fungsinya sebagai jembatan penentu keberhasilan visi-misi kepala daerah, acuan akuntabilitas kinerja instansi, serta pedoman utama yang bersifat indikatif dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dalam konstelasi perencanaan, dokumen ini disusun berpedoman teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Periode 2022–2027, yang secara hierarki juga telah menyelaraskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) DIY 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Visi dan Misi Gubernur DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) DIY, serta dinamika wilayah provinsi sekitar. Target strategis ini yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY untuk setiap tahunnya. Posisi dan keterkaitan makro tersebut secara visual dapat dicermati pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1. 2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Gambaran Kondisi yang Mendasari Perubahan Renstra

Meskipun instrumen perencanaan jangka menengah telah ditetapkan, dalam perjalanannya terdapat dinamika eksternal dan internal yang menuntut dilakukannya reviu mendasar. Kondisi riil yang melandasi penyusunan Perubahan Renstra Disperindag DIY Tahun 2022-2027 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial, antara lain:

- **Amanat Regulasi dan Kebijakan Makro Terbaru:** Adanya perkembangan regulasi daerah, khususnya penetapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD 2022-2027 dan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJP DIY 2025-2045, serta Surat Edaran (SE) Nomor 00.7.2/8357 tentang Penyusunan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 yang mewajibkan penyesuaian target-target kinerja daerah.
- **Mitigasi Risiko Krisis Global:** Terjadinya dinamika perekonomian makro, krisis geopolitik internasional, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tekanan inflasi energi domestik sepanjang tahun 2026 yang secara langsung berdampak pada stabilitas sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk bersikap antisipatif dalam mengkalibrasi ulang target indikator kinerja agar tetap realistis namun tetap optimal.
- **Evaluasi Capaian Kinerja Eksisting:** Realisasi kinerja sektor perindustrian yang sempat fluktuatif serta melampaui target awal pada tahun 2025 (mencapai angka 4,37%) memerlukan evaluasi mendalam agar target pada sisa periode Renstra (tahun 2026 dan 2027) dapat disesuaikan sebagai basis penguatan ekosistem industri yang tangguh.

- **Akselerasi Isu Strategis Sektoral:** Menguatnya urgensi transformasi digital menuju Industri 4.0, implementasi konsep ekonomi hijau (*green economy* dan *green industry*), penguatan perlindungan konsumen, fasilitas HKI, serta tuntutan perluasan jangkauan pasar ekspor bagi IKM lokal di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan dan strategi yang adaptif dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, serta tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir masa berlaku RPJMD, yaitu tahun 2027. Melalui implementasi dokumen ini, seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan dapat berjalan secara lebih terukur, tepat sasaran, serta memberikan kemanfaatan yang optimal bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat. Dalam tatanan operasional, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disperindag DIY ini wajib dipergunakan sebagai acuan dan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disperindag DIY secara tahunan. Selain itu, dokumen ini menjadi basis dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Penganggaran berbasis kinerja tersebut diorientasikan sepenuhnya untuk mendukung operasional program dan kegiatan yang telah ditetapkan, guna memastikan kontribusi nyata Disperindag DIY dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DIY secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Sebagai landasan operasional fungsional, seluruh perumusan program, kegiatan, indikator, dan penganggaran dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); *(Catatan: Diperbaiki dari "UU 15/2004" karena UU Perbendaharaan Negara yang tepat adalah Nomor 1 Tahun 2004)*
4. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014** tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014** tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

B. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); *(Catatan: Menggantikan PP 15/2010 yang sudah dicabut)*
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015** tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667); *(Catatan: Diperbaiki dari PP "15/2015" menjadi PP "14/2015" sesuai nomenklatur aslinya)*

3. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022**;
4. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); *(Catatan: Diperbarui dari Perpres 2/2015 agar relevan dengan linimasa Renstra saat ini)*

C. Peraturan Menteri

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); *(Catatan: Menggantikan Permendagri 13/2006 jo. 59/2007 yang sudah tidak berlaku)*
2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

D. Peraturan Daerah (Perda) DIY

1. **Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
2. **Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024** tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
3. **Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 10);

E. Peraturan Gubernur (Pergub) dan Surat Edaran

1. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; *(Catatan: Kalimat menggantung dilengkapi, Pergub ini merevisi kelembagaan Disperindag DIY dari dasar hukum sebelumnya)*
2. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023** tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
3. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023** tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. **Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.2/8357** tentang Penyusunan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan sektoral jangka menengah yang adaptif sebagai instrumen penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sektor industri dan perdagangan di DIY hingga tahun 2027. Dokumen perubahan ini berfungsi mengkalibrasi ulang arah pembangunan daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027 serta arah kebijakan industri dan perdagangan nasional.

1.3.2. Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 adalah sebagai berikut:

1. **Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah:** Menjabarkan arah pandang dan agenda prioritas RPJMD DIY 2022-2027 ke dalam rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja urusan perindustrian dan urusan perdagangan yang terukur selama sisa periode perencanaan;
2. **Restrukturisasi Program dan Kerangka Pendanaan:** Merumuskan kembali nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, serta rencana pembiayaan operasional Disperindag DIY untuk periode Tahun Anggaran 2022–2027 dengan

- mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan realitas capaian pembangunan makro;
3. **Penetapan Target Kinerja Ekspektatif dan Antisipatif:** Menetapkan target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) yang dilengkapi pembagian pagu indikatif, sebagai langkah mitigasi risiko dan langkah antisipatif terhadap krisis geopolitik global, gejolak nilai tukar rupiah, serta tekanan inflasi domestik;
 4. **Penguatan Basis Akuntabilitas dan Evaluasi Tahunan:** Menyediakan pedoman dan tolok ukur formal yang valid bagi internal dinas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disperindag DIY yang akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 disajikan dengan struktur yang ringkas dan padat sesuai dengan amanat SE Sekda DIY Nomor 10 Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang: Memuat gambaran kondisi riil yang mendasari perubahan, definisi, amanat regulasi, serta nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat daftar regulasi yang relevan, wajib mencantumkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah DIY Tahun 2025-2027.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Menguraikan maksud dan tujuan spesifik dilakukannya perubahan dokumen perencanaan operasional jangka menengah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Berisi uraian ringkas mengenai struktur materi pada masing-masing bab.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah: Menyajikan data tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya (SDM dan aset), kelompok sasaran, mitra pelayanan,

serta kerja sama daerah. Bagian ini wajib memuat hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 2 (dua) tahun terakhir (2025–2026) mulai dari capaian IKU, IKK, hingga subkegiatan menggunakan analisis deskriptif dan diagnostik.

2.2. Identifikasi Permasalahan: Rumusan kesenjangan antara realita capaian dengan kondisi ideal, yang disarikan secara ringkas dari evaluasi internal, dokumen RPJMD 2022-2027, dan Laporan KLHS RPJMD.

2.3. Identifikasi Isu Strategis: Analisis lingkungan dinamis (global, nasional, regional) termasuk penyesuaian terhadap agenda nasional (Asta Cita/Prioritas Nasional, Program Prioritas Presiden, Kegiatan Prioritas Utama, PSN, dan Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC).

2.4. Perumusan Isu Strategis Daerah: Kesimpulan akhir yang memadukan permasalahan, isu dinamis, dan potensi urusan perindustrian dan perdagangan di DIY.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran: Rumusan kondisi akhir tahun ke-5 (2027) yang menggunakan kalimat kondisi (bukan aktivitas), bersifat intermediate outcome, terukur, serta mengacu pada NSPK dan Pergub DIY No. 13/2026 (Disperindag DIY direkomendasikan memiliki 1 Tujuan yang menggabungkan urusan perindustrian dan perdagangan).

3.2. Strategi: Rencana tindakan komprehensif, penentuan fokus program, serta penyajian lokus pengembangan sektoral berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY.

3.3. Manajemen Risiko Strategis: Narasi dan tabulasi pengendalian risiko prioritas dalam pencapaian tujuan/sasaran dengan berpedoman pada Pergub DIY Nomor 78 Tahun 2022.

3.4. Arah Kebijakan: Rangkaian kerja operasionalisasi NSPK yang selaras dengan strategi dan RPJMD, dilengkapi narasi dukungan konkret terhadap kebijakan nasional (Asta Cita, PHTC, dll).

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Cascading Perencanaan: Matriks hubungan logis hasil cascading dari Tujuan hingga Subkegiatan.

- 4.2. Matriks Program dan Pendanaan Indikatif (2022–2027): Tabel rencana kerja dan kerangka pendanaan multi-tahun yang disesuaikan berdasarkan kondisi perubahan (apakah indikator tetap, bertambah, atau mengalami penyesuaian target/nomenklatur) sesuai kodefikasi SIPD RI Pemutakhiran.
- 4.3. Penetapan Target Indikator Kinerja: Penyajian khusus Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur tujuan/sasaran, dan Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) selaku tolok ukur penyelenggaraan urusan.
- 4.4. Tabel Dukungan Kebijakan Nasional: Tabulasi program/kegiatan kedinasan yang mendukung klaster Asta Cita, Program Prioritas Presiden, Kegiatan Prioritas Utama, PSN, dan PHTC.

BAB V: PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan transisi, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah urusan perindustrian dan perdagangan di DIY.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu dan Perbaikan Pohon Kinerja Perangkat Daerah.
2. Dokumen Reviu dan Penyesuaian Matriks Cascade Perencanaan (yang terkoneksi hingga Visi-Misi Kepala Daerah).

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY) secara hukum diatur berdasarkan **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan regulasi tersebut, Disperindag DIY mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis sebagai berikut:

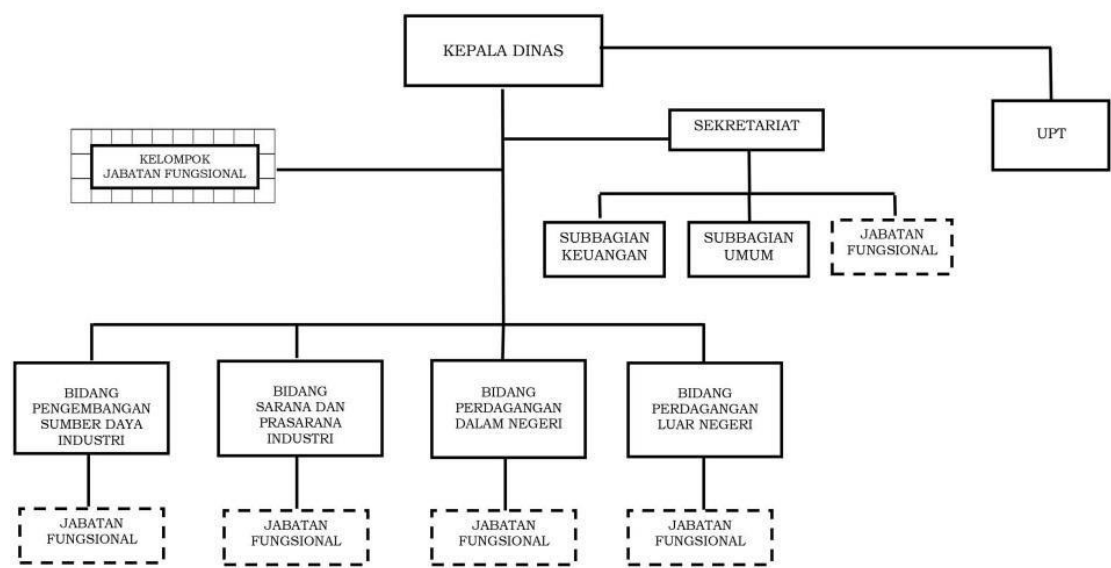
1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
5. Peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
6. Fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
7. Pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
8. Pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
9. Fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
10. Fasilitasi sarana dan prasarana industri;
11. Pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
12. Penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
13. Fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis, dan informasi rekayasa alat tepat guna;
14. Fasilitasi kemasan dan produk kulit;
15. Pengawasan distribusi bahan berbahaya;
16. Penerbitan surat keterangan asal dan fasilitasi angka pengenal impor;

17. Pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
18. Pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
19. Fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
20. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
21. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
22. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
24. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
25. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) lingkup Dinas;
26. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
28. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; serta
29. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan urusan cakupan tugasnya.

Guna memastikan seluruh fungsi pelayanan di atas berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dirancang secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2022, Disperindag DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan didukung oleh Sekretariat, 4 (empat) Bidang Teknis, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan rincian komponen struktur organisasi sebagai berikut:

- **Kepala Dinas**
- **Sekretariat**, membawahi:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
- **Bidang Perindustrian**
- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri**
- **Bidang Perdagangan Luar Negeri**
- **Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**
- **Unit Pelaksana Teknis (UPT):**
 - Balai Pengembangan Komoditas dan Rekayasa Alat Tepat Guna (*atau sebutkan nama UPT spesifik kedinasan Anda sesuai Pergub 74/2023*)
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Secara visual, bagan tata hubungan, hierarki, dan garis komando struktur kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY disajikan dalam **Gambar 2.1** berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran;
- k. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- l. penyelenggaraan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- m. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- n. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;

- o. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- p. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
- q. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- r. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- s. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Dinas;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri

Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia industri;
- d. pembinaan asosiasi dan perkumpulan industri;
- e. koordinasi teknis pemanfaatan sumber daya alam bagi industri;
- f. peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri;
- g. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri;
- h. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- i. penetapan industri unggulan daerah;
- j. koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- k. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Sarana dan Prasarana Industri

Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- c. pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk;
- d. pembinaan Industri Hijau;
- e. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana sentra industri kecil dan menengah;
- g. fasilitasi sarana dan prasarana industri;
- h. pengelolaan data dan sistem informasi industri;
- i. pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri;
- j. fasilitasi rekomendasi teknis perizinan bidang industri;
- k. koordinasi dan fasilitasi pusat desain industri nasional;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana Industri; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen serta pembinaan konsumen;
- e. pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
- f. pemasaran dan promosi produk dalam negeri;
- g. melakukan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,
- i. pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku usaha distribusi;
- j. pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- k. pembinaan iklim usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- l. pembinaan kelembagaan, kemitraan, dan usaha perdagangan;
- m. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, dan barang penting;

- n. koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
- o. pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri;
- c. fasilitasi ekspor impor;
- d. pengelolaan data dan informasi ekspor impor;
- e. penerbitan surat keterangan asal;
- f. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional/lintas daerah provinsi; h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
- h. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang kerja sama internasional, pembiayaan perdagangan, prosedur dan dokumen, penunjang perdagangan internasional, pelayanan perdagangan;

- i. koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk peningkatan ekspor;
- j. analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial;
- k. pelaksanaan hubungan kerja sama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- l. pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

f. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas perindustrian dan perdagangan menyatakan bahwa Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPTTG mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. pelaksanaan pengembangan, dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan edukasi dan publikasi hasil pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil, pengembangan, dan penerapan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi;

- h. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis;
- i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga bantu. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 124 Orang. Sebanyak 76 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil, 37 Orang P3H, dan 11 Orang Tenaga Harian Lepas. Berikut ini rincian pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

NO	UNIT KERJA	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH
1	Sekretariat			4	2	8	4	18
2	Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri			1		2	1	4
3	Bidang Perdagangan Dalam Negeri			2		1	1	4
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri			1			1	2
5	Bidang Sarana dan Prasarana Industri			1		2	1	4
6	Jabatan Fungsional Disperindag DIY					14	6	20
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna			6	1	3	3	13

NO	UNIT KERJA	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH
8	Jabatan Fungsional BPTTG				2	8	1	11
	JUMLAH	0	0	15	5	38	18	76

Data Pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	I	II	III	IV	JUMLAH
1	Sekretariat		2	13	3	18
2	Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri			3	1	4
3	Bidang Perdagangan Dalam Negeri			3	1	4
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri			1	1	2
5	Bidang Sarana dan Prasarana Industri			3	1	4
6	Jabatan Fungsional			18	2	20
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		1	11	1	13
8	Jabatan Fungsional BPTTG			2	9	11
	JUMLAH	0	3	54	19	76

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Disperindag DIY juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat	6
2	Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri	2
3	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	4
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri	3
5	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	-
6	Jabatan Fungsional	-
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	22

8	Jabatan Fungsional BPTTG	-
	JUMLAH	37

Tabel 2.4
Data Tenaga Harian Lepas

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat	
2	Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri	1
3	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	3
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
5	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	-
6	Jabatan Fungsional	
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	7
8	Jabatan Fungsional BPTTG	
	JUMLAH	11

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya didukung dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Selain kendaraan bermotor juga didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet.

Tabel 2.5 Sarana-Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
1.	Tanah	11	29,409,962,000
2.	Peralatan dan Mesin	3.826	51,414,838,711
3.	Gedung dan Bangunan	26	26,345,837,672
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	6,452,968,800
5.	Aset Tetap Lainnya	193	98,642,450
	Jumlah		113,722,249,633

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana BPTTG

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Bor	5 Unit	
2	Mesin Bor tangan	10 Unit	
3	Mesin Bubut	2 Unit	
4	Mesin Cylinder	2 Unit	
5	Mesin Gergaji	1 Unit	
6	Mesin Gergaji Logam	1 Unit	
7	Mesin Gerinda	2 Unit	
8	Mesin Gerinda tangan	16 Unit	
9	Mesin Ketam	2 Unit	
10	Mesin Ketam	4 Unit	
11	Mesin Kompresor	4 Unit	
12	Mesin Milling	1 Unit	
13	Mesin Pemotong Plat	3 Unit	
14	Mesin Pres Hidrolik dan Punsh	3 Unit	
15	Alat Ukur Uji	1 Unit	
16	Peralatan Las Karbit	1 Unit	
17	Peralatan Las Listrik	8 Unit	
18	Perkakas Bangku Kerja	4 Unit	
19	Perkakas Pemotong Plat	1 Unit	
20	Forklift	4 Unit	
21	Genset	1 Unit	
22	Landasan Kenteng	1 Unit	
23	Pickup	2 Unit	
24	Komputer	13 Unit	
25	Lain-lain	165 Unit	
	Jumlah	257 Unit	

Selain sumberdaya yang telah disebutkan diatas, dalam melaksanakan ketugasannya, Disperindag DIY juga didukung oleh sumber daya yang berbasis teknologi informasi. Berikut ini adalah aplikasi yang mendukung ketugasan Disperindag DIY.

1. Website Disperindag

Website Disperindag beralamatkan di <http://disperindag.jogjaprov.go.id>. Melalui website ini, Disperindag DIY dapat menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ketugasannnya kepada masyarakat.

2. Website Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG)

Website BPTTG beralamatkan di <http://bpttg.jogjaprov.go.id>. Melalui website ini, BPTTG DIY dapat menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ketugasannnya kepada masyarakat.

3. Aplikasi Jogjaplaza

Aplikasi jogjaplaza ini merupakan aplikasi mall online yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi Disperindag DIY kepada pelaku usaha sector industri dan perdagangan DIY agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Aplikasi ini beralamatkan di <http://jogjaplaza.jogjaprovo.go.id>.

4. Aplikasi Pelayanan HKI Online

Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi Disperindag DIY kepada pelaku usaha sector industri dan perdagangan DIY berkaitan dengan perlindungan atas kekayaan intelektualnya. Aplikasi ini beralamatkan di <http://jogjaki.jogjaprovo.go.id>.

5. Aplikasi E-Arsip

Aplikasi E-Arsip merupakan aplikasi yang dibangun Disperindag DIY untuk mengelola arsip secara digital. Melalui aplikasi ini, arsip yang sudah didigitalisasi disimpan secara digital sehingga mudah untuk dipanggil kembali jika dibutuhkan.

6. Aplikasi Jogja Busines Service Centre (JBSC)

Dalam rangka meningkatkan layanan Disperindag kepada pelaku usaha di DIY di tengah terjadinya pandemi covid-19, dimana layanan tatap muka dibatasi, maka disperindag mengembangkan aplikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengkonsultasikan permasalahan usahanya untuk mendapatkan solusi. Perwakilan dari berbagai instansi dilibatkan sebagai operator dan konsultan pada aplikasi ini.

7. Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER)

Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER) merupakan layanan pengaduan konsumen secara online.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya

Target kinerja pada akhir masa renstra Disperindag DIY periode 2017-2022 menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2018 dan 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 kinerja layanan Disperindag DIY terendala adanya Covid-19. Capaian target kinerja pelayanan Disperindag DIY, disajikan dalam table 2-1.

Tabel 2-7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Kinerja	Target	Targ	Tar get Ind	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
-------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

NO	sesuai Tugas dan Fungsi Perangka t Daerah	NSPK	et IKK	i kat or Lain nya	ke-														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Milyar Rupiah)				1,55	1,75	1,95	2,25		1,95	1,95	1,29	2,48		126%	111%	66%	110%	
2	Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan				5,69	5,61	5,5	5,5		5,69	5,69	1,92	1,2		100%	101%	35%	22%	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	standar (persen)																		
3	Nilai Produksi IKM (Juta Rupiah)				12.724 .663	12.979.156,00	13.238 .739	13503 514		12.749 .271	13.041 .847	12.561 .595	1350351 4		100 %	100%	95%	100 %	
4	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (persen)				0.06	na	na	na		0.06	na	na	na		100 %	na	na	na	
5	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Juta US\$)				302,54	308,59	314,76	321,06		327,18	344,80	410,06	521,04		108 %	112%	130 %	162 %	
6	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (produk ATG)				18	21,00	24	27		18	28,00	42	39		100 %	133%	175 %	144 %	
7	Jumlah HAKI yang terdaftar (unit)				na	100,00	120	150			100,00	277	150		na	100%	231 %	100 %	

8	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	
9	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	
10	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	
11	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				na	na	na	100					100		na!	na	na	100%	



	(persen)																		
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2-8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- Rata Pertumbu han	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggara n	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak Langsung	11,7 8	11,9 8	11,2 1	15,1 2	8,7 6	11,5 8	11,7 6	11,0 0	14,6 8	8,5 6	98,3 1	98,2 1	98,0 3	97,0 7	97,6 6	-3%	10%
Belanja Langsu ng	19,5 2	15,9 1	15,1 5	17,9 0	17,6 6	17,7 2	14,9 0	14,2 6	16,0 9	17,0 7	90,7 8	93,6 8	94, 1	89,9 0	96,6 0	-2%	-2%
Total Belanja	31,3 0	27,8 8	26,3 6	33,0 2	26,4 3	29,3 0	26,6 6	25,2 6	30,7 7	25,6 2	93,6 1	95,6 3	94, 5	93,1 8	96,9 6	-3%	3%

*) diisikan nama Perangkat Daerah
*) Disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Pelayanan di sektor perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggran. Pada table 2-2 disajikan perkembangan anggaran Disperindag DIY selama tahun 2017 – 2022. Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa secara rata-rata anggaran Disperindag DIY mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 3 %. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kemetrologian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten.

b. Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 – 2021

Kinerja pembangunan sector perindustrian dan perdagangan DIY pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan capaian yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan terlampauinya target kinerja sasaran pada tahun tersebut. Target kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY dapat terlampaui dengan capaian sebesar 101% pada tahun 2018 dan begitu pula tahun 2019. Target kinerja Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY dapat terlampui dengan capaian sebesar 103% pada tahun 2018 dan sebesar 104% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 capaian kinerja sector perindustrian dan perdagangan sebesar 99% dan 96%. Hal ini, disebabkan dampak dari adanya pandemic Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 target kinerja sector ini dapat tercapai.

Tabel 2-9

Pencapaian Target Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	8.122.805	8.528.946	8.955.393	9.403.163	8.219.289	8.219.289	8.228.553	9.490.978	101%	96%	92%	101%
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	12.153.1563	12.637.626	13.143.131	13.668.856	12.487.005	12.487.004	12.577.438	13.759.739	103%	99%	96%	101%

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY juga menunjukkan capaian yang positif, jika dilihat dari capaian target indikator program. Pada table 2-8 terlihat bahwa hampir semua target program dapat tercapai.

Tabel 2-10
Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Milyar Rupiah)	1,55	1,75	1,95	2,25	1,95	1,95	1,29	2,48	126%	111%	66%	110%
2	Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (persen)	5,69	5,61	5,5	5,5	5,69	5,69	1,92	1,2	100%	99%	286%	458%
3	Nilai Produksi IKM (Juta Rupiah)	12.724.663	12.979.156,00	13.238.739	13503514	12.749.271	12.322.138,11	12.561.595	13503514	100%	95%	95%	100%
5	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun (Juta US\$)	302,54	308,59	314,76	321,06	327,18	344,80	410,06	521,04	108%	112%	130%	162%
6	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (produk ATG)	18	21,00	24	27	18	28,00	42	39	100%	133%	175%	144%
7	Jumlah HAKI yang terdaftar (unit)	n/a	100,00	120	150	n/a	100,00	277	150	n/a	100%	231%	100%
8	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a

	(persen)												
9	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a
10	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a
11	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100%

NO	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	aparatur (persen)												

c. Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan 2 (Dua) Tahun Terakhir Dari Tahun 2024-2025

Berikut ini capaian kinerja pelaksanaan urusan sektor industri dan perdagangan pada tahun 2024.

Tabel 2-11
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja (Sasaran / Program)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB	%	5,32	3,94	74,06
2	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	2,50	3,63	145,20
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Nilai	A (91,55)	A (95,47)	103,19

Tabel 2-12
Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja (Sasaran / Program)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	545	565	103,67
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	90	100	111,11
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	20	46,2	231
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang, Jasa yang Sesuai dengan Standard	%	96	99,94	104,1
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp Milyar	2,64	3,19	120,83
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	413.500	373.480	90,32
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	Perusahaan	600	2552	425,33
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	Perusahaan	16.543	23.852	144,18
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	90,32	90,32
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Trilyun	13,38	14,87	111,14
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	1	1	100
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	60	60	100

Berikut ini capaian kinerja pelaksanaan urusan sektor industri dan perdagangan pada tahun 2025.

Tabel 2-13
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja (Sasaran / Program)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB	%	5.38	5.27	97.96
2	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	3.7	4.37	118.11
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Nilai	A (91,55)	A (95,47)	103,19

Tabel 2-14
Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Persentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	85,0	91.85	108.06
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	2,0	2,0	100,0
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Triliun	13.78	15.97	115.89
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	575,0	575,0	100,0
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	90,0	100,0	111.11
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	20,0	25,0	125,0
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standard	%	96.5	96.5	100,0
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan sengketa konsumen	%	97,0	100,0	103.09
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp Milyar	2.65	2.7	101.89
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	414.000,0	396.540,0	95.78
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	%	86.5	90,0	104.05
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	Perusahaan	17.043,0	27.501,0	161.36
16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	Perusahaan	700,0	3.023,0	431.86
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	75,0	75,0	100,0

2.4 Kelompok Sasaran OPD

Kelompok sasaran (*target groups*) pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, serta fasilitasi kebijakan kedinasan. Kelompok sasaran ini dikategorikan ke dalam 4 (empat) klaster utama sebagai berikut:

1. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Budaya dan Kreatif

Klaster ini merupakan pilar utama sasaran pembinaan ekonomi hilir di DIY yang memanfaatkan dukungan Dana Keistimewaan. Sasaran spesifiknya meliputi:

- Wirausaha Baru (WUB) dan IKM Tradisional: Pengrajin (batik, lurik, kayu, perak, kulit), produsen makanan-minuman olahan lokal, dan pelaku industri

kreatif kemasan yang membutuhkan stimulasi modal, pelatihan manajemen usaha, serta bantuan alat tepat guna.

- **Pelaku Industri Hijau (Green Industry):** IKM kontemporer yang mulai mengadopsi prinsip efisiensi bahan baku dan energi ramah lingkungan.
- **Asosiasi dan Klaster Industri:** Wadah/paguyuban perajin sektoral di tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi mitra dalam penyaluran program fasilitasi standardisasi mutu (SNI, Sertifikasi Halal) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Pelaku Usaha Perdagangan, Logistik, dan Eksportir

Klaster ini merupakan motor penggerak stabilitas ekonomi dan penguatan pasar, yang terdiri atas:

- **Pelaku Usaha Mikro-Kecil (UMK) Sektor Perdagangan:** Pedagang pasar rakyat/tradisional serta pelaku usaha ritel mandiri yang memerlukan perlindungan dari ekspansi pasar modern.
- **Pelaku Usaha Ekspor (Eksportir Eksisting & Potensial):** Perusahaan atau komoditas lokal skala menengah-besar yang menerima layanan Surat Keterangan Asal (SKA), fasilitasi Angka Pengenal Impor (API), serta program promosi dagang luar negeri.
- **Asosiasi Logistik dan Distribusi:** Mitra kerja dalam pengelolaan dan optimalisasi Pusat Distribusi Regional (PDR) dan Pusat Distribusi Provinsi guna memotong jalur distribusi logistik yang panjang.

3. Masyarakat Konsumen (Masyarakat Umum)

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengguna akhir dari produk industri dan perdagangan, dengan fokus pelayanan pada:

- **Perlindungan Konsumen:** Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, edukasi, perlindungan atas hak-hak konsumen, serta akses pengaduan terhadap peredaran barang/jasa yang tidak sesuai standar mutu dan keselamatan.
- **Masyarakat Rentan Inflasi:** Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran langsung dari operasi pasar, pasar murah, dan pemantauan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting).



4. Kelembagaan internal dan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Mitra kerja struktural yang menjadi sasaran pembinaan tata kelola, meliputi:

- **Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY:** Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan di tingkat kabupaten/kota selaku sasaran koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan sinkronisasi kebijakan makro sektoral.
- **Aparatur Intern Disperindag DIY:** Pegawai, pejabat fungsional (seperti Penyuluh Perindag, Pengawas Kemetrolagian, Penguji Mutu Barang), serta pengelola arsip kedinasan yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas SDM dan reformasi birokrasi

2.5 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan pelayanan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan dua tahun terakhir (2025–2026), dokumen RPJMD, serta laporan KLHS. Permasalahan ini mencerminkan kesenjangan (*gap*) antara kondisi riil pelayanan Disperindag DIY saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci, identifikasi permasalahan pembangunan pada urusan perindustrian dan urusan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Urusan Perdagangan

1. **Kerentanan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pokok akibat Tekanan Inflasi Domestik:** Masih tingginya risiko fluktuasi harga dan gangguan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di pasar rakyat yang dipicu oleh dinamika inflasi energi domestik dan rantai pasok regional.
2. **Belum Optimalnya Pengamanan dan Penguatan Pasar Domestik dari Invasi Produk Impor:** Serbuan produk impor murah via platform *cross-border e-commerce* mengancam eksistensi produk lokal dan eksistensi pasar tradisional di wilayah DIY.
3. **Keterbatasan Pengetahuan Eksportir terhadap Manajemen Risiko Global:** Terbatasnya pemahaman pelaku ekspor IKM mengenai mitigasi risiko perdagangan luar negeri, ketidakpastian geopolitik global, hambatan

nontarif (*non-tariff barriers*), serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang tahun 2026.

4. **Tingginya Beban Biaya Standardisasi Komoditas Ekspor:** Hambatan finansial dan administratif bagi pelaku usaha lokal dalam memenuhi standardisasi internasional, seperti pemenuhan SVLK (Sertifikasi Kelayakan Kehutanan) terbaru serta sertifikasi keamanan pangan global (*HACCP/ISO*).
5. **Rendahnya Kepatuhan dan Penegakan Regulasi Tertib Niaga di Tingkat Lokal:** Belum optimalnya pengawasan terhadap standardisasi ukuran/timbangan (kemetrolagian) serta sistem perlindungan konsumen, yang ditandai dengan masih adanya gap pengawasan sistem harga dan kuantitas barang beredar di pusat-pusat perbelanjaan.
6. **Belum Optimalnya Utilisasi Infrastruktur Logistik Daerah:** Keberadaan fasilitas seperti Pusat Distribusi Regional (PDR) dan koridor logistik YIA belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha lokal untuk menekan biaya logistik kedinasan.
7. **Rendahnya Kesadaran Implementasi P3DN:** Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten pada sektor pengadaan barang/jasa publik non-pemerintah dan masyarakat umum di DIY.

2.5.2. Urusan Perindustrian

1. **Keterbatasan Akses Bahan Baku Industri dan Lemahnya Rantai Pasok Lokal:** Tingginya ketergantungan pelaku IKM DIY terhadap bahan baku impor atau pasokan luar daerah, yang menyebabkan kerentanan operasional akibat kendala logistik global.
2. **Rendahnya Kapasitas Produksi dan Adopsi Teknologi Tepat Guna (TTG):** Mayoritas IKM di DIY masih mengandalkan metode manufaktur konvensional karena keterbatasan akses dan modal untuk melakukan peremajaan mesin serta implementasi teknologi Industri 4.0.
3. **Belum Optimalnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penerapan SNI:** Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya HKI sebagai instrumen daya saing, ditambah mahalannya biaya sertifikasi mutu produk (SNI) untuk skala usaha mikro-kecil.
4. **Sistem Pembinaan IKM yang Belum Terintegrasi secara Berkelanjutan:** Pola pendampingan dan pembinaan klaster industri sektoral di Kabupaten/Kota masih bersifat parsial dan belum mengadopsi

prinsip berkelanjutan (*eco-efficiency*) menuju industri hijau (*green industry*).

5. **Kemitraan yang Asimetris antara Industri Kecil dengan Industri Besar:** Belum terbentuknya jejaring kemitraan (*supply chain linkage*) yang saling menguntungkan dan mengikat secara legal-formal antara pelaku IKM lokal dengan korporasi besar atau BUMN/BUMD.
6. **Tingginya Biaya Komponen Produksi (Sektor Energi):** Beban tarif dasar listrik untuk sektor industri dan fluktuasi biaya energi domestik yang relatif tinggi mempersempit margin keuntungan dan menurunkan daya saing harga produk IKM DIY di pasar nasional.
7. **Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas Sentra Industri:** Beberapa kawasan peruntukan industri dan sentra IKM di wilayah perbatasan (terutama bagian selatan DIY) masih terkendala kualitas infrastruktur jalan dan utilitas penunjang yang kurang memadai.

2.6 Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Hubungan Logis Perubahan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD DIY

Sebagai dokumen perencanaan yang selaras dan terintegrasi, Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022–2027 disusun dengan merujuk pada visi, misi, dan sasaran makro Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD DIY 2022–2027.

b. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin diwujudkan pada periode 2022–2027 adalah:

“Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

c. Misi Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) Misi Pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; serta
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

d. Posisi dan Dukungan Sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Berdasarkan dokumen Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah (Pergub DIY No. 13/2026), Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki peran strategis yang bersifat *cross-cutting* dalam mendukung pencapaian misi dan sasaran pembangunan daerah, dengan lokus kontribusi utama pada klaster berikut:

- **Dukungan terhadap Misi Ke-1:** Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan.
 - **Sasaran Daerah yang Didukung:** Terwujudnya tingkat penghidupan ekonomi masyarakat yang layak serta penurunnya angka kemiskinan regional.
 - **Kontribusi Sektoral:** Melalui program penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) di tingkat kalurahan, fasilitasi alat tepat guna, serta penguatan kapasitas produksi IKM berbasis bahan baku lokal untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
- **Dukungan terhadap Misi Ke-2:** Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.
 - **Sasaran Daerah yang Didukung:** Terwujudnya aglomerasi ekonomi dan pertumbuhan pusat-pusat industri-perdagangan baru di koridor selatan DIY.
 - **Kontribusi Sektoral:** Melalui fasilitasi pengembangan sentra IKM dan kawasan peruntukan industri di wilayah selatan, serta optimalisasi rute logistik domestik menuju pusat distribusi.

- **Dukungan terhadap Misi Ke-3:** Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
 - Sasaran Daerah yang Didukung: Meningkatnya daya saing daerah melalui pemanfaatan ekosistem digital.
 - Kontribusi Sektoral: Melalui digitalisasi pasar rakyat, fasilitasi pasar daring (e-commerce) bagi produk lokal, integrasi sistem informasi industri nasional (SIINas), serta akselerasi penerapan teknologi Industri 4.0 pada pelaku usaha binaan.

2.6.2. Telaahan Renstra K/L

Dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (*alignment policy*), Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan telaahan mendalam terhadap arah kebijakan makro Kementerian Perindustrian RI. Fokus telaahan ini diselaraskan dengan agenda penumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada hilirisasi, kemandirian industri, akselerasi teknologi, dan penguatan rantai pasok dalam negeri.

Hasil analisis terhadap indikator, target, dan program prioritas Kemenperin RI yang berimplikasi langsung terhadap pelayanan urusan perindustrian di Daerah Istimewa Yogyakarta dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.15
: Matriks Telaahan Renstra Kemenperin RI dan Implikasinya terhadap Perubahan Renstra Disperindag DIY 2022–2027

Target / Kebijakan Strategis Kemenperin RI	Arah Program & Kegiatan Kemenperin	Implikasi bagi Pelayanan Disperindag DIY (Peluang / Tantangan)	Bentuk Penyelarasan dalam Perubahan Renstra Disperindag DIY
Akselerasi Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Lokal	Penumbuhan dan pengembangan industri hulu-hilir terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik.	Peluang: Akses fasilitasi pusat dan daerah terbuka lebar bagi pengembangan sektor unggulan DIY seperti industri pengolahan makanan, tekstil/pakaian jadi, dan kerajinan kulit berbasis budaya.	Mengoptimalkan alokasi Dana Keistimewaan untuk peningkatan kapasitas produksi, perbaikan desain, dan standarisasi IKM pengolahan komoditas lokal agar siap masuk rantai pasok hulu-hilir nasional.

Target / Kebijakan Strategis Kemenperin RI	Arah Program & Kegiatan Kemenperin	Implikasi bagi Pelayanan Disperindag DIY (Peluang / Tantangan)	Bentuk Penyelarasan dalam Perubahan Renstra Disperindag DIY
Peningkatan Adopsi Teknologi digital (Amanat Making Indonesia 4.0)	Implementasi transformasi digital, perluasan literasi Industri 4.0, serta fasilitasi peremajaan mesin/peralatan produksi untuk IKM.	Peluang & Tantangan: Menjadi peluang pendampingan teknologi berbasis akademisi (<i>Triple Helix</i>), sekaligus tantangan karena rendahnya literasi digital awal pada sebagian besar IKM tradisional DIY.	Mengakselerasi layanan konsultasi input data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan memperluas cakupan pelatihan <i>digital marketing</i> serta otomasi lini produksi IKM kontemporer.
Sertifikasi Mutu dan Standardisasi (SNI, Halal, & Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN)	Penguatan pengawasan pasar dari barang ilegal, peningkatan fasilitasi sertifikasi produk, dan implementasi ketat program P3DN.	Tantangan: Persepsi mahal biaya standardisasi bagi pelaku usaha mikro. Peluang: Keharusan pemanfaatan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa publik memperluas pasar domestik.	Memperluas kuota fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) , standardisasi mutu SNI, pengurusan HKI, serta memperkuat koordinasi Tim P3DN DIY guna mengunci serapan produk lokal di lingkungan Pemda dan BUMD.
Pengembangan Industri Hijau (<i>Green Industry</i>) dan Berkelanjutan	Pemberian insentif bagi industri yang menerapkan prinsip efisiensi energi, penurunan emisi, dan pengelolaan limbah ramah lingkungan.	Peluang: Pasar ekspor global memiliki minat yang sangat tinggi terhadap produk kerajinan (<i>handicraft</i>) dan mode ramah lingkungan (<i>sustainable/eco-fashion</i>) khas Jogja.	Merumuskan insentif non-fiskal berupa fasilitasi pameran internasional khusus bagi IKM DIY yang menerapkan prinsip produksi bersih (<i>eco-efficiency</i>) dan bahan baku alam terbarukan.
Penguatan Ekosistem Rantai Pasok Industri Dalam Negeri	Pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor dan optimalisasi jaringan logistik industri antar wilayah.	Tantangan: Fluktuasi harga bahan baku penolong impor yang tinggi dapat memicu inflasi sektor manufaktur lokal.	Mengintegrasikan fungsi Pusat Distribusi Regional (PDR) DIY sebagai penyangga (<i>buffer stock</i>) pasokan bahan baku industri guna menjaga stabilitas harga di tingkat sentra IKM.

Sementara itu, pengembangan sector sektor dan perdagangan di daerah juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pada tabel 3.2 disajikan Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sinkronisasi spasial antara kebijakan operasional industri-perdagangan dengan pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039. Regulasi ini menggariskan arah kebijakan makro spasial yang berimplikasi langsung terhadap fokus pembinaan pelayanan Disperindag DIY, khususnya dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan revitalisasi sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Secara garis besar, arah kebijakan RTRW DIY yang menjadi acuan strategis meliputi dua klaster utama:

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sesuai amanat RTRW DIY 2019–2039, pengembangan sektor industri manufaktur skala menengah-besar diarahkan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

KPI Sentolo (Kabupaten Kulon Progo): Ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi regional. Keberadaan KPI Sentolo dioptimalkan sebagai growth pole (pusat pertumbuhan) baru di wilayah barat DIY guna menggerakkan investasi sektor industri, menyerap tenaga kerja lokal secara masif, serta menekan angka pengangguran terdidik. Pengembangan KPI ini didukung penuh oleh integrasi koridor logistik internasional menuju Yogyakarta International Airport (YIA).

Agregasi Spasial Wilayah Lain: Arahkan pemanfaatan ruang juga menetapkan klusterisasi kawasan peruntukan industri pengolahan non-polutan yang tersebar secara proporsional di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan potensi karakteristik keunggulan lokal masing-masing daerah.

2. Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Kebudayaan

Karakteristik sebaran industri di DIY didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam sentra-sentra produksi tradisional.

Pola Spasial Non-Polutan: Secara umum, sentra IKM di DIY (seperti kerajinan, batik, lurik, makanan olahan, dan produk kulit) merupakan kategori industri kreatif hilir low/non-pollutant. Karakteristik ini tidak mensyaratkan lokalisasi khusus yang terpisah jauh dari kawasan permukiman penduduk, melainkan menyatu dalam ekosistem kehidupan masyarakat (berbasis kalurahan).

Arah Kebijakan Pelayanan: Pola pengembangan ruang yang diadopsi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bukan merupakan relokasi atau

pembangunan sentra baru secara masif (greenfield expansion), melainkan berfokus pada revitalisasi sentra eksisting (brownfield revitalization). Intervensi kedinasan diarahkan pada daerah-daerah atau kalurahan yang memiliki embrio sentra IKM potensial namun mengalami stagnasi pertumbuhan. Langkah ini dilakukan melalui fasilitasi modernisasi alat tepat guna, perbaikan tata letak (layout) produksi yang higienis, penguatan rantai pasok bahan baku, serta peningkatan aksesibilitas transportasi penunjang sentra.

Implikasi terhadap Dokumen Perubahan Renstra Disperindag DIY:

1. Kebijakan RTRW ini memperkuat argumentasi Disperindag DIY dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD (Pemberdayaan Kawasan Selatan) melalui akselerasi investasi di KPI Sentolo dan optimalisasi rute logistik distribusi barang perdagangan.
2. Pola sentra IKM yang menyatu dengan pemukiman dan berbasis kerajinan/budaya lokal mempermudah justifikasi yuridis penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai program-program pelatihan inovasi produk serta standardisasi mutu langsung di level kalurahan.

2.6.3. Telaah RPJP DIY

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tidak hanya diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), melainkan wajib menjaga konsistensi arah makro sektoral yang tertuang dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2025-2045**.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan pemutakhiran target indikator kinerja pelayanan hingga tahun 2027 berada dalam koridor transformasi menuju visi jangka panjang DIY.

1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2045

Arah dan cita-cita masa depan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dirumuskan dalam visi:

“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.”

2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2025–2045

Sebagai penerjemahan taktis dan terperinci untuk mewujudkan Visi 2045, ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan Jangka Panjang DIY sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat melalui transformasi sosial untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, kesehatan untuk semua, termasuk di dalamnya lingkungan hidup dan permukiman yang berkualitas serta kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan inovasi dan kreativitas, pemanfaatan IPTEK, pengembangan ekonomi budaya, dan peningkatan kualitas produk melalui transformasi ekonomi dengan menempatkan Kawasan Selatan sebagai kawasan prioritas pertumbuhan;
3. Mewujudkan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui transformasi tata kelola untuk memastikan ketaatan asas, kelembagaan yang efektif, proses bisnis yang adaptif, aparatur yang berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, transformasi digital, integritas partai politik, serta relasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil;
4. Menciptakan kondisi stabilitas keamanan, demokrasi substansial, dan ekonomi makro yang tangguh melalui penguatan penegakan hukum dan kehidupan yang dilandasi moral serta etika luhur;
5. Meningkatkan kualitas tata ruang dan permukiman, ketahanan ekologi, dan pembangunan kebudayaan yang merespon dinamika perubahan dan tekanan;
6. Menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan yang berorientasi pada pengembangan Kawasan Selatan sebagai pintu gerbang wilayah;
7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta
8. Menciptakan kondisi pembangunan yang berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan.

3. Posisi dan Kontribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam Tahapan Jangka Panjang

Dalam struktur klasterisasi pembangunan ekonomi makro daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengemban mandat krusial dalam mengawal keberhasilan **Misi Ke-2**, yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi regional dengan menempatkan Kawasan Selatan sebagai prioritas utama.

Pada tahapan periodisasi pertama jangka panjang, yaitu **Arah Kebijakan Periode 2025–2029**, fokus pembangunan daerah dititikberatkan pada peningkatan produktivitas pada sektor strategis yang mencakup Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam hal ini, Disperindag DIY berperan sebagai *leading sector* (pengampu utama) yang mengunci dukungan penuh terhadap arah kebijakan sub-sektor strategis **Industri Pengolahan** melalui intervensi:

- Akselerasi hilirisasi industri komoditas lokal dan diversifikasi produk turunan ekspor.
- Peningkatan nilai tambah dan modernisasi teknologi proses bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna mendorong daya saing produk.
- Klasterisasi penumbuhan wirausaha baru dan penguatan rantai pasok distribusi perdagangan di wilayah koridor selatan, selaras dengan penegasan kawasan tersebut sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi baru DIY.

2.6.4. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyelarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025–2029 merupakan mandat konstitusional untuk memastikan terciptanya integrasi perencanaan yang sinergis antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*vertical alignment*). Melalui telaahan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengidentifikasi klaster agenda nasional yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan di daerah.



1. Visi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional yang menjadi acuan utama pencapaian target jangka menengah menuju cita-cita Indonesia Emas adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menegaskan bahwa akselerasi pembangunan memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dengan memperkuat fondasi strategis yang telah berjalan guna mewujudkan posisi Indonesia sebagai negara maju yang mandiri dan berdaya saing global.

2. Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita)

Untuk mewujudkan visi tersebut, dicanangkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional—yang dikenal sebagai **Asta Cita**—serta dikelompokkan ke dalam arsitektur transformasi nasional sebagai berikut:

- **Klaster Transformasi Utama:**
 1. **Transformasi Sosial**, guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, dan sejahtera.
 2. **Transformasi Ekonomi**, guna meningkatkan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan hilirisasi.
 3. **Transformasi Tata Kelola**, guna memastikan regulasi yang adaptif, berintegritas, serta pelayanan publik yang inklusif berbasis digital.
- **Klaster Landasan Transformasi:**
 4. **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**, demi kepastian usaha dan ketangguhan makroekonomi.
 5. **Ketahanan Sosial-Budaya dan Ekologi**, guna melestarikan lingkungan hidup dan merespons dinamika perubahan iklim.
- **Klaster Kerangka Implementasi:**
 6. **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**, demi meminimalkan kesenjangan antarwilayah.
 7. **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**, guna mendukung konektivitas logistik nasional.
 8. **Kesinambungan Pembangunan**, untuk menjamin konsistensi tahapan transformasi lintas periode.

3. Kontribusi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Dalam arsitektur RPJMN 2025–2029, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengambil peran sentral dalam mendukung dan mengoperasionalkan **Misi Ke-2 (Transformasi Ekonomi)** di tingkat daerah.

Fokus pelaksanaan transformasi ekonomi nasional diarahkan untuk memacu produktivitas makro melalui penguatan iptek, inovasi, dan pengembangan ekonomi produktif. Disperindag DIY menjabarkan amanat nasional tersebut ke dalam pelaksanaan urusan daerah melalui intervensi program prioritas sebagai berikut:

- **Akselerasi Industri Manufaktur dan IKM Kontemporer:** Mendorong peningkatan kapasitas produksi sentra-sentra industri daerah agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang kompetitif di pasar domestik dan ekspor.
- **Penerapan Ekonomi Hijau (*Green Economy*):** Menginisiasi sosialisasi dan fasilitasi penerapan prinsip industri hijau yang hemat energi dan ramah lingkungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
- **Akselerasi Transformasi Digital:** Mendukung digitalisasi pasar rakyat, fasilitasi pemasaran berbasis *e-commerce*, serta pemanfaatan platform *Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* untuk efisiensi birokrasi dan akurasi data sektoral.
- **Integrasi Ekonomi Domestik dan Penguatan Pasar global:** Mengoptimalkan fungsi jembatan logistik melalui *Pusat Distribusi Regional (PDR)* DIY guna menjaga stabilitas pasokan bahan baku, membentengi pasar domestik dari serbuan barang ilegal, serta memfasilitasi legalitas ekspor bagi komoditas unggulan daerah.

2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY) merupakan Perangkat Daerah yang mengemban mandat yuridis untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur DIY yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2022–2027, Disperindag DIY melakukan pembinaan terstruktur terhadap para pelaku usaha binaan dengan menyelaraskan aspek keruangan (spasial) serta penanganan isu-isu strategis makro.

Pada tataran keruangan, pengembangan sektor industri manufaktur dan hilirisasi di DIY secara ketat mengacu pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY. Penyelarasan ini mewujudkan pada optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sentolo di Kabupaten Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) baru di wilayah barat, serta klasterisasi kawasan peruntukan industri non-polutan yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam kerangka besar mewujudkan **Renaissance Yogyakarta**, perencanaan pembangunan industri dan perdagangan diorientasikan untuk menjawab dua tantangan struktural utama Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi indikator makro RPJMD 2022–2027, yaitu:

1. **Masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah;** serta
2. **Masih tingginya ketimpangan pembangunan antarkawasan (utara-selatan).**

Sebagai bentuk dekonstruksi operasional untuk menyelesaikan tantangan makro di atas, Disperindag DIY merumuskan 14 (empat belas) Isu Strategis Sektor sebagai landasan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan strategis kedinasan dari tahun 2022 hingga tahun 2027 sebagai berikut:

A. Kluster Isu Strategis Bidang Perindustrian

1. **Akselerasi Transformasi Digital Menuju Implementasi Industri 4.0:** Mendorong adopsi teknologi informasi dan otomatisasi pada lini produksi pelaku usaha binaan.
2. **Optimalisasi dan Percepatan Investasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI):** Memaksimalkan keterisian lahan industri di KPI Sentolo dan kawasan industri regional lainnya guna menyerap tenaga kerja lokal secara masif.
3. **Pemberdayaan dan Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) Pengentas Kemiskinan:** Memanfaatkan alokasi Dana Keistimewaan untuk mencetak IKM baru di tingkat kalurahan guna memperluas lapangan kerja.
4. **Kepastian Ketersediaan dan Ketahanan Rantai Pasok Bahan Baku Industri:** Meminimalkan ketergantungan bahan baku impor melalui pemanfaatan potensi komoditas lokal.
5. **Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Industri Hijau (*Green Industry*):** Memfasilitasi efisiensi energi dan bahan baku ramah lingkungan pada sentra-sentra IKM kontemporer.

6. **Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Industri dan Alokasi Teknologi Tepat Guna (TTG):** Modernisasi sarana produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas volume produksi IKM.
7. **Penguatan Daya Saing IKM Melalui Sertifikasi Mutu (SNI) dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):** Mengakselerasi pemenuhan standar produk lokal dan perlindungan hukum merek dagang daerah.

B. Klaster Isu Strategis Bidang Perdagangan

1. **Penguatan Kapasitas Usaha dan Kemitraan Multipihak (*Supply Chain Linkage*):** Membangun jejaring kemitraan yang adil dan mengikat antara pelaku IKM mikro-kecil dengan eksportir mapan maupun industri skala besar.
2. **Keterbatasan Jumlah Pelaku IKM Berorientasi Ekspor Menuju Pasar Global:** Mengatasi hambatan teknis pelaku usaha lokal dalam menembus dan mempertahankan posisi di pasar internasional.
3. **Belum Optimalnya Sinergitas Hulu-Hilir dan Utilisasi Perjanjian Perdagangan Internasional:** Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan skema kerja sama dagang bebas (*Free Trade Agreement*) RI dengan negara mitra.
4. **Tingginya Biaya Logistik dan Fluktuasi Tarif Pengiriman Ekspor:** Mitigasi dampak gejolak finansial global terhadap efisiensi biaya logistik perdagangan luar negeri daerah.
5. **Perluasan dan Optimalisasi Pemasaran Produk Lokal Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri:** Mengintegrasikan promosi dagang luring dengan penguatan ekosistem *e-commerce*.
6. **Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Penegakan Regulasi Tertib Niaga:** Menjamin kepastian hukum, standarisasi ukuran (kemetrolagian), keamanan produk, serta sistem pemantauan harga bapokting yang transparan di pasar domestik.
7. **Akselerasi dan Penguatan Komitmen Gerakan Nasional P3DN:** Mengunci serapan produk industri lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta memperluas kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.



BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra PD Tahun 2022-2027

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY merupakan rumusan kondisi yang diinginkan untuk mendukung secara langsung perwujudan visi dan misi Gubernur DIY dalam kurun waktu tahun 2022–2027. Rumusan ini dirancang agar sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menjawab tantangan ekonomi regional, mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan makro, serta memenangkan persaingan global yang bergerak cepat.

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY hingga tahun 2027 adalah:

“Meningkatnya daya saing sektor industri manufaktur dan sektor perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional maupun global.”

B. Sasaran Perangkat Daerah

Guna mengoperasionalkan pencapaian tujuan strategis di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menetapkan 2 (dua) sasaran perangkat daerah yang merepresentasikan pelaksanaan urusan wajib pilihan secara spesifik:

- 1. **Sektor Urusan Perdagangan**
 - **Rumusan Sasaran:** Meningkatkan kinerja dan nilai tambah aktivitas perdagangan daerah serta penguatan perlindungan konsumen.
 - **Fokus Indikator:** Diukur melalui pertumbuhan nilai perdagangan domestik-ekspor serta indeks tertib niaga.
- 2. **Sektor Urusan Perindustrian**
 - **Rumusan Sasaran:** Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur) berbasis budaya dan teknologi.
 - **Fokus Indikator:** Diukur melalui pertumbuhan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan serta peningkatan jumlah IKM naik kelas.

Sintesis hubungan logis antara tujuan, sasaran, serta indikator kinerja

utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY disajikan secara komprehensif dalam matriks perencanaan di bawah ini.

Pada tabel 3-1, disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY beserta indikator kinerjanya.

Tabel 3-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya daya saing sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY			12,05 %	12,10 %	12,15 %	12,20 %	12,25 %	12,30 %	12,30 %
			Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
				Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di	Kategori RB Perangkat Daerah	A (88,67)	A (88,67)	A (88,67)	A (88,67)	A (88,67)	A (88,67)	A (88,67)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perangkat Daerah								
		Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY			8,29 %	8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,54 %	8,54 %
			Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	5,49 %	5,49 %
				Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta	US \$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Perencanaan stratejik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana stategis mencakup Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, cara

pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan dan Program.

Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir.

Untuk dapat diketahui seberapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan maka dilakukan upaya-upaya mencermati dan menganalisis lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut :

1. Analisis Eksternal

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Posisi DIY dalam konteks nasional sangat strategis, terutama pasca ditetapkannya Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan status keistimewaan, DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya maupun pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Pergeseran paradigma pembangunan “Dari Among Tani Menuju Dagang Layar” ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela). Selain itu juga mengembangkan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasan Jawa bagian selatan dan sebagai penghubung bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilakukan dengan cara mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir.

Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi DIY dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.
- Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja.
- Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh

BUMN.

- Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.
- Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara online.

b. Ancaman

- Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
- Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.
- Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih.
- Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi.
- Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor.
- Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM.
- Maraknya produk-produk dari negara-negara yang lebih dahulu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19

2. Analisis Internal

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat khususnya KUKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan yang dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan

- DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampanya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan
- Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,

- Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (*growth pole*) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat-timur,
- Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional

b. Kelemahan

- Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi,

- Lemahnya IKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar,
- Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal,
- Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,
- Lemahnya entrepreneurship IKM di DIY.
- Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM

Dengan mengetahui / memahami Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman maka tahap selanjutnya adalah menuangkan semua aspek tersebut kedalam tabel Analisis (Analisis SWOT) untuk dapat ditemukan Strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Disperindag DIY.

Tabel 3-2 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan 2. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif, 3. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat- timur, 4. Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif. 5. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional	1. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi, 2. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar, 3. Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal, 4. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional, 5. Lemahnya entrepreneurship UKM di DIY. 6. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM
PELUANG	STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)

1. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, 2. Posisi DIY di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya hub koridor di wilayah Selatan Jawa, 3. Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja. 4. Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN. 5. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY. 6. Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara <i>online</i>.	1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun <i>online</i>, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif 4. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	1. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas
ANCAMAN	STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
1. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. 2. Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor, 3. Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih 4. Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi dan proses kredit yang berbelit 5. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor 6. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM. 7. Maraknya produk-produk dari negara-negara yang lebih dahulu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19	1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dari hasil tabel analisis tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
5. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
7. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

Berdasarkan strategi tersebut diatas arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga
3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor
4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk.
5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses Produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)
6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif
7. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha
8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
11. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga
12. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja

- perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor
13. Peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga
 14. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk.
 15. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Industri)
 16. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif
 17. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha
 18. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM
 19. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY
 20. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
 21. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga
 22. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor

Tabel 3-4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi			
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan; MISI 2 : Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; MISI 3 : Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; MISI 4 : Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha, pengembangan pemasaran 2. Menjaga kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional	1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor

Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan Penting	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.	Peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga
Meningkatnya daya saing sektor Industri	Meningkatnya industri pengolahan	1. Penguatan dan Penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan sector industri yang berwawasan lingkungan (Green Industri) 3. Penguatan dan Penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industry kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada Pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan	1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk. 2. Pengembangan teknologi industry yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Industri</i>) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

		fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	
Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha, pengembangan pemasaran 2. Menjaga kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional	1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasionaldengan Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin kepastian pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah jangka pendek Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Periode 2022–2027, diperlukan sebuah sistem mitigasi yang terstruktur terhadap berbagai ketidakpastian lingkungan internal maupun eksternal. Penerapan pengelolaan risiko pada Disperindag DIY dilaksanakan dengan berpedoman secara ketat pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Pengelolaan risiko strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko prioritas yang berpotensi menghambat atau menggagalkan kontribusi Dinas terhadap capaian target makro daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah) serta pencapaian indikator kinerja urusan perindustrian dan perdagangan.

Sesuai dengan mandat Pergub No. 78/2022, proses perumusan risiko pada Disperindag DIY dilakukan dengan menggunakan instrumen Risk Meta-Language (Meta-Bahasa Risiko). Pendekatan standar ini memisahkan secara logis tiga elemen utama risiko untuk menghindari kerancuan antara masalah yang sudah terjadi (fakta/issue), ketidakpastian yang diantisipasi (risiko), dan akibat akhir yang ditimbulkan (dampak), dengan formula standar.

Pada Tabel 4.3. disajikan daftar risiko strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta..

Tabel 4.3. Daftar Risiko Strategis Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
					Risiko	Sebab	Akibat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PERANGKAT DAERAH : DISPERINDAG									
1a	Tujuan Strategis Pemda								
a)	Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat								
b)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
1b	Sasaran Strategis Pemda								
a)	Penghidupan ekonomi yang layak								
b)	Meningkatnya good governance								
2a	Tujuan Strategis OPD								
a	Terwujudnya daya saing sektor Industri								
b	Terwujudnya daya saing sektor Perdagangan								
2b	Sasaran Strategis OPD								
a	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	Strategis	1. Permintaan akan produk DIY menurun	1. Terjadi resesi baik dalam negeri atau luar negeri	Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target	Sedang	Adanya telaah yang mendalam terkait negara tujuan ekspor baru yang akan dibuka pasarnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
					Risiko	Sebab	Akibat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Strategis	2. Aktifitas produksi tidak dapat berjalan dengan baik	2. iklim usaha yang tidak kondusif	Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target	Sedang	Koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki tupoksi berkaitan dengan penyebab iklim usaha tidak kondusif
				Strategis	3. Pasokan bahan baku terhambat dan proses produksi tidak berjalan lancar	3. Terjadi kelangkaan Logistik	Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target	Sedang	Sosialisasi, temu kemitraan dengan penyedia bahan baku, mendorong OPD pengampu sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan agar sektor ini dapat menyediakan bahan baku lokal dengan baik
				Strategis	4. Proses produksi tidak dapat berjalan lancar	4. Terjadi kelangkaan dan peningkatan harga bahan baku	Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target	4. Proses produksi tidak dapat berjalan lancar	Sosialisasi, temu kemitraan dengan penyedia bahan baku, mendorong OPD pengampu sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan agar sektor ini dapat menyediakan bahan baku lokal dengan baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
					Risiko	Sebab	Akibat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Poin	Strategis	Tidak tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi Disperindag DIY	Dinamika regulasi Reformasi Birokrasi di Pusat menyebabkan perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah sampai pada level perangkat daerah	Kurang optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena terdapat perubahan metode penilaian	Sedang	Koordinasi dan kolaborasi antar bagian dan antar instansi terkait
c	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	Persen	Strategis	1. Permintaan akan produk DIY menurun	1. Terjadi resesi baik dalam negeri atau luar negeri	Omset pelaku usaha perdagangan menurun	Sedang	Adanya telaah yang mendalam terkait negara tujuan ekspor baru yang akan dibuka pasarnya
				Strategis	2. Aktifitas perdagangan tidak dapat berjalan dengan baik	2. iklim usaha yang tidak kondusif	Omset pelaku usaha perdagangan menurun	Rendah	Peningkatan perluasan pasar baik konvensional maupun online
				Strategis	3. Pasokan bahan baku terhambat dan proses produksi tidak berjalan lancar	3. Terjadi kelangkaan Logistik	Kelangkaan komoditi yang diperdagangkan sehingga	Tinggi	Sosialisasi, temu kemitraan dengan penyedia bahan baku, mendorong OPD pengampu sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
					Risiko	Sebab	Akibat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							terjadi inflasi		kehutanan agar sektor ini dapat menyediakan bahan baku lokal dengan baik
				Strategis	4. Proses produksi tidak dapat berjalan lancar	4. Terjadi kelangkaan dan peningkatan harga bahan baku	Kelangkaan komoditi yang diperdagangkan sehingga terjadi inflasi	Rendah	Sosialisasi, temu kemitraan dengan penyedia bahan baku, mendorong OPD pengampu sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan agar sektor ini dapat menyediakan bahan baku lokal dengan baik
				Strategis	5. komoditas tidak tersedia untuk diperjualbelikan	5. Terjadi gagal panen	Terjadinya inflasi bahan pokok	Sedang	Menjalin koordinasi dengan penyedia bahan pokok dari provinsi lain
				Strategis	6. Perubahan permintaan komoditi ekspor dan penyediaan bahan baku impor	6. Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim yang mengganggu ekosistem ekspor impor	Volume ekspor menurun	Tinggi	Menjalin koordinasi dengan penyedia bahan pokok dari provinsi lain dan Temu kemitraan dengan penyedia bahan baku

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
					Risiko	Sebab	Akibat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									bekerjasama dengan ITPC negara tujuan ekspor



3.4. Keselarasan dan Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang berkesinambungan (*vertical planning alignment*), Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY merumuskan arah kebijakan dan strategi kedinasan yang berkontribusi langsung pada agenda prioritas nasional. Dukungan sektoral ini dijabarkan mulai dari level makro (Asta Cita) hingga level implementatif eksekusional seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap Misi Asta Cita / Prioritas Nasional

Dalam arsitektur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah Pusat menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang disebut **Asta Cita**. Disperindag DIY mengambil peran strategis dalam mengoperasionalkannya di tingkat daerah melalui:

- **Asta Cita Misi Ke-2 (Meningkatkan Produktivitas Ekonomi):** Diimplementasikan melalui program fasilitasi modernisasi mesin produksi, penguatan rantai pasok industri manufaktur, serta akselerasi hilirisasi komoditas lokal berbasis budaya untuk meningkatkan nilai tambah daerah.
- **Asta Cita Misi Ke-5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan):** Dioperasionalkan melalui sosialisasi dan fasilitasi penerapan prinsip *Green Industry* (Industri Hijau) ramah lingkungan serta penguatan struktur IKM hilir agar mampu mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

2. Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Disperindag DIY mengunci dukungan penuh terhadap Program Prioritas Presiden dalam hal kemandirian ekonomi nasional dan penguatan pasar domestik, dengan fokus intervensi pada:

- **Akselerasi Gerakan Nasional P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri):** Menjadi *leading sector* dalam mengawal komitmen penyerapan produk lokal DIY pada pengadaan barang/jasa publik di lingkungan instansi pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta BUMD guna membentengi industri domestik.
- **Transformasi Digital Ekonomi Rakyat:** Memfasilitasi digitalisasi manajemen pasar rakyat/tradisional serta perluasan akses pasar digital (*e-commerce*) bagi produk-produk kerajinan dan fesyen unggulan Jogja.

3. Keterkaitan dengan Kegiatan Prioritas Utama

Kegiatan operasional Dinas dirancang untuk menyasar indikator kuantitatif pada Kegiatan Prioritas Utama Nasional, meliputi:

- **Standardisasi dan Mutu Produk:** Pemberian fasilitasi Sertifikasi Halal gratis, pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi IKM potensial ekspor agar memiliki daya saing tinggi di pasar global.
- **Penguatan Pengawasan Pasar dan Perlindungan Konsumen:** Pelaksanaan tera dan tera ulang (kemetrologian) secara konsisten untuk memastikan tertib niaga serta perlindungan hak pengonsumsi barang/jasa di tingkat lokal.

4. Penyelarasan dengan Program Strategis Nasional (PSN)

Pada sektor pengembangan kawasan dan konektivitas, Disperindag DIY menyelaraskan arah pembinaannya dengan Program Strategis Nasional, khususnya dalam:

- **Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sentolo:** Mendorong percepatan realisasi investasi industri manufaktur non-polutan di Kulon Progo guna menciptakan aglomerasi ekonomi baru di koridor barat DIY.
- **Penguatan Ekosistem Halal Hub:** Membangun ekosistem industri halal terintegrasi di DIY guna menangkap peluang pasar produk halal global (makanan, kosmetik, dan fesyen muslim).

5. Dukungan Infrastruktur Terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)

Disperindag DIY memosisikan diri sebagai pemanfaat hilir dari infrastruktur PSN yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat di wilayah DIY, meliputi:

- **Akselerasi Koridor Logistik Yogyakarta International Airport (YIA):** Memanfaatkan konektivitas bandara internasional untuk memfasilitasi percepatan rute logistik ekspor produk-produk kreatif bernilai tinggi (*high-value creative products*) asal DIY menuju pasar global.
- **Pemanfaatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS):** Mengembangkan sentra-sentra IKM baru dan klaster perdagangan lokal di sepanjang koridor selatan untuk menekan ketimpangan antarwilayah, sesuai dengan amanat pembangunan wilayah selatan Jogja.

6. Kontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Wins

Pemerintah Pusat menetapkan sejumlah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk memberikan stimulus ekonomi instan bagi masyarakat. Disperindag DIY memberikan kontribusi nyata pada klaster berikut:

- **PHTC Sektor Kemandirian Pangan dan Gizi (Sisi Distribusi):** Dinas secara aktif mengendalikan inflasi daerah dengan melakukan pemantauan intensif, operasi pasar, dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) bagi masyarakat rentan.
- **PHTC Sektor Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi:** Melaksanakan program penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) pengolahan pangan dan kerajinan berbasis kalurahan untuk menciptakan lapangan kerja instan di kantong-kantong kemiskinan DIY.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY disusun berdasarkan dekonstruksi program prioritas yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022–2027, yang kemudian diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi tata kelola kedinasan.

Rencana program prioritas beserta keluaran (output) program Disperindag DIY selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan subkegiatan operasional. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada arah kebijakan jangka menengah kedinasan dengan mengoptimalkan dua urusan wajib pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang diuraikan sebagai berikut::

1. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diorientasikan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan luar negeri sebagai salah satu akselerator utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, kinerja ekspor DIY menunjukkan tren positif.

Komoditas unggulan ekspor non-migas DIY meliputi Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Biji Vanili, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Pakaian Jadi Kulit, Kerajinan Tas, Bambu, Produk Tekstil Lainnya, Kerajinan Kayu, Kerajinan Anyaman, *Wig* (Rambut Palsu), dan Kerajinan Batu. Adapun negara tujuan ekspor utama meliputi Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia, Prancis, China, dan Spanyol. Meskipun potensi kemitraan global cukup menjanjikan, akselerasi volume usaha perdagangan luar negeri dihadapkan pada beberapa tantangan struktural, antara lain:

- Keterbatasan agregasi pelaku ekspor
- Rendahnya kapasitas dan penetrasi pelaku usaha lokal dalam mengakses saluran pasar internasional secara mandiri;
- Keterbatasan literasi pelaku usaha mengenai dinamika kebijakan ekonomi global, regulasi teknis negara tujuan (*non-tariff barriers*), serta pemanfaatan skema perjanjian perdagangan internasional.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Program Peningkatan Kerja Sama dan Pengembangan Ekspor memfokuskan penyelenggaraan aktivitas pada subkegiatan:

- Pembinaan, pendampingan, dan standardisasi teknis calon eksportir (coaching program for new exporters);
- Fasilitasi perizinan ekspor-impor serta penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); dan
- Penyelenggaraan promosi dagang internasional, business matching, serta diplomasi dagang terpadu.

2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan untuk memperkuat struktur pasar domestik dan meningkatkan omzet pelaku usaha perdagangan di dalam daerah guna mendorong penguatan daya beli masyarakat. Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB DIY sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi barang dan efektivitas perlindungan pasar lokal. Beberapa isu strategis dalam skema perdagangan dalam negeri meliputi:

- Keterbatasan jangkauan pemasaran dan rantai distribusi yang belum efisien bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Keterbatasan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana perdagangan fisik, termasuk pasar rakyat dan pusat distribusi;
- Rendahnya kapasitas manajerial dan literasi bisnis digital bagi para pelaku usaha perdagangan informal.

Intervensi kedinasan dalam rangka peningkatan nilai transaksi perdagangan dalam negeri diwadahi melalui aktivitas:

- Fasilitasi kemitraan, promosi produk lokal unggulan, serta perluasan akses pasar digital (e-commerce);
- Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan sarana-prasarana perdagangan (pasar rakyat dan pusat distribusi regional); serta
- Pembinaan, edukasi, dan fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri.

3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Sektor perdagangan domestik memerlukan instrumen pengendalian yang kuat terhadap potensi gejolak harga, kelangkaan pasokan, serta peredaran barang yang tidak memenuhi standar keselamatan. Program ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, menjamin kepastian hukum, kepastian ukuran, serta melindungi hak-hak konsumen. Masalah mendasar yang dihadapi di lapangan meliputi:

- Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen mengenai regulasi tertib niaga dan pemenuhan standar mutu produk;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang berbahaya, ilegal, atau tidak berizin di pasar domestik;
- Keterbatasan jangkauan kelembagaan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten/kota.

Sebagai langkah mitigasi, program ini memayungi rangkaian aktivitas strategis berupa:

- Pemantauan, pengawasan stok, dan diseminasi informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) secara real-time;

- Pelaksanaan pengawasan barang beredar, pengujian sampel produk, koordinasi tertib niaga, serta pelayanan tera dan tera ulang (kemetrologian) secara berkala;
- Pemberdayaan konsumen serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
- Penegakan regulasi dan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan dan kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) dalam struktur ekonomi DIY melalui peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam perkembangannya, pasca-evaluasi dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 terdahulu dan ketidakpastian rantai pasok global tahun 2026 yang menekan produktivitas sebagian pelaku usaha, Disperindag DIY melakukan penyesuaian (re-baselining) target kinerja secara realistis tanpa mengurangi komitmen hilirisasi. Hambatan utama pengembangan IKM di DIY meliputi:

- A. Rendahnya daya saing produk akibat keterbatasan adopsi teknologi industri modern;
- B. Fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku/penolong industri;
- C. Belum optimalnya hubungan kemitraan strategis (supply chain linkage) antara industri skala kecil-menengah dengan industri skala besar atau eksportir.

Guna mengakselerasi IKM naik kelas, proses utama dalam pelaksanaan program ini mencakup subkegiatan:

- Penyelenggaraan pelatihan diversifikasi produk, teknik produksi modern, manajemen mutu, serta bimbingan desain produk;
- Fasilitasi dan pendampingan pemenuhan standar teknis (Sertifikasi SNI, Halal, HACCP) dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Fasilitasi perluasan akses pasar, pameran dagang (test pasar), dan kurasi produk IKM potensial; serta
- Penguatan kerja sama kemitraan hulu-hilir antar-sektor, lintas-sektor, dan lintas-daerah di bidang industri pengolahan.

5. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan potensi Budaya

Sebagai perwujudan operasional amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Disperindag DIY mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan ke dalam pembangunan ekonomi. Program ini berfokus pada pelestarian industri berbasis budaya (cultural-based industry) seperti batik tulis njeron beteng, kerajinan perak Kotagede, tatah sungging, dan industri kreatif lainnya

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis lokalitas kalurahan.

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini merupakan pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada pilar urusan keistimewaan tata ruang. Di tingkat operasional perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengintegrasikan pemanfaatan Anggaran Dana Keistimewaan untuk melakukan penataan, pengembangan, dan penyelarasan tata ruang ekonomi yang berbasis pada pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam dokumen Perubahan Renstra ini, fokus utama Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang didasarkan pada fakta spasial bahwa sentra-sentra IKM tradisional di DIY tumbuh secara organik di dalam ekosistem permukiman masyarakat (berbasis kalurahan) dan koridor wilayah tertentu. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk menjawab tantangan tata ruang ekonomi melalui Penataan dan Revitalisasi Ruang Produksi Sentra IKM Berbasis Budaya.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Program ini merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada pilar urusan keistimewaan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Di tingkat operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, program ini diorientasikan inovasi layanan publik.

Seluruh program pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan untuk periode Perubahan Renstra 2022–2027 harus diterjemahkan secara konkret ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan operasional. Langkah dekonstruksi ini dilakukan agar seluruh target sasaran makro daerah dapat dicapai secara efektif. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas dirancang sedemikian rupa guna mencerminkan akuntabilitas kinerja yang selaras dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tata kelola Disperindag DIY.

Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai ukuran keberhasilan pencapaian instansi dalam mendukung visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan Gubernur DIY. Keberhasilan tersebut diukur melalui akumulasi pencapaian target hasil (outcome) program setiap tahun anggaran, maupun capaian akumulatif yang ditargetkan pada akhir periode perencanaan jangka menengah.

Secara teknis, indikator kinerja Perangkat Daerah dirumuskan dengan mengadopsi target indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) maupun indikator kompositnya (impact). Pencapaian target kinerja ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan dari perwujudan tujuan dan sasaran program urusan perindustrian, perdagangan, serta keistimewaan untuk periode 2022–2027..

Tabel 4-1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tuj u an	Sasar a n	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere nca n aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lok asi	Keterangan
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						arg et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Ter w ujud n ya daya sain g sekt o r Ind us tri dan Per dag ang an				Kontribu si Industri Pengolah an Terhada p PDRB DIY	12,05 %	12,05 %		12,10 %		12,15 %		n/a		n/a		n/a %		n/a		Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	Target Semula

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	n/a	n/a		n/a		n/a		11.89 - 12.20		11.97 - 12.25		12.06 - 12.30		12.06 - 12.30		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyesuaian Indikator karena penyeselarasan dengan nomenklatur RPJPD. Target Menjadi, Penyesuaian dilakukan karena target tahun n leboh tinggi dari capaian tahun n-1
	Meningkatnya industri pengolahan			Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	0,99 %		n/a		2,50 %		3,00 %		3,50 %		4,00 %		4,00 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	Target semula
				Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp . 33 Juta / Orang		Rp . 34 Juta / Orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
				Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	n/a		n/a		n/a	n/a		3,70 %		3,80 %		4.1%		4.1%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Target Menjadi, Penyesuaian dilakukan karena target tahun n leboh tinggi dari

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

																				a ganga n		capaian tahun n-1
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	n/a	n/a	0	n/a	0	1 Sentra	1.000.000.00	2 Sentra	1.500.000.00	3 Sentra	2.000.000.00	3 Sentra	2.000.000.00	9 Sentra	6.500.000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Tetap

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja dan Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	9 Dokumen	6.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	0	0	3 Dokumen	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp			tar g et

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2.22.08	PROGRA M PENYELE NG GARAAN KEISTIME W AAN YOGYAK AR TA URUSAN KEBUDA YA AN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. 12,8 0 Triliu n	Rp. 12,8 0 Trili u n	17.067 .629.5 00	n/a	19.964 .702.0 00	Rp. 13,3 8 Trili u n	12.960 .000.0 00	Rp. 13,7 8 Triliu n	19.500 .000.0 00	Rp. 14,2 7 Tril iu n	20.000 .000.0 00	Rp. 14,8 4 Trili u n	20.500 .000.0 00	Rp. 14,8 4 Tril iu n	92.924. 702.00 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Tetap
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	6,6 Trily u n	6,6 Trily u n		6,8 Trily u n		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
		2.22.08 .5.06	Sarana Prasarana Keistimew a an Urusan Kebudaya an	Terlaksana n ya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewa an Urusan Kebudayaan	na	na	0	na	0	na	1.000. 000.00 0	100%	6.000. 000.00 0	100%	6.000. 000.00 0	100%	6.000. 000.00 0	100%	19.000. 000.00 0	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		
		2.22.08 .5.06.0 1	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	na	na	0	na	0	1	1.000. 000.00 0	2	6.000. 000.00 0	2	6.000. 000.00 0	2	6.000. 000.00 0	7	19.000. 000.00 0	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	3950 IKM	3950 IKM	17.067.629.500	6.145 IKM	19.964.702.000	6.200 IKM	11.960.000.000	6.300 IKM	13.500.000.000	6.400 IKM	14.000.000.000	6.500 IKM	14.500.000.000	31.545 IKM	73.924.702.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
--	--	--------------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------------------------------	--	--

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2.22.08 .5.08.0 3	Pengemb an gan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangka n	3950 Unit	3950 Unit	17.067 .629.5 00	6145 Unit	19.964 .702.0 00	6200 Unit	11.960 .000.0 00	6300 Unit	13.500 .000.0 00	6400 Unit	14.000 .000.0 00	6500 Unit	14.500 .000.0 00	3154 5 Unit	73.924. 702.00 0	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.31.02	PROGRA M PERENCA N AAN DAN PEMBAN	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	387.2 10 Orang	387. 210 Ora n g	11.192 .297.4 00	412. 630 Ora n g	9.742. 934.75 0	413. 500 Ora n g	3.550. 000.00 0	414.0 000r a ng	3.600. 000.00 0	414. 500 Ora n g	3.650. 000.00 0	415.0 00r a ng	3.700. 000.00 0	415. 000 Ora n g	24.242. 934.75 0	Dina s Peri nd ustri a n		Tetap

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			GU NAN INDUSTRI																	dan Perd a gang a n		
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) BPTTG	79,08 %	79,08 %		n/a		84,00 %		86,50 %		89,00 %		89,50 %		89,50 %				
		3.31.02 .1.01	Penyusuna n , Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembang un an Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangun an Industri Provinsi	6 Dok u men	6 Dok u men	11.192 .297.4 00	3 Dok u men	9.742. 934.75 0	3 Dok u men	3.550. 000.00 0	3 Dok u men	3.600. 000.00 0	3 Dok u men	3.650. 000.00 0	3 Dok u men	3.700. 000.00 0	3 Dok u men	24.242. 934.75 0	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		
		3.31.02 .1.01.0 3	Koordinas i, Sinkronisa si , dan Pelaksan aa n Pembangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 Dok u men	1 Dok u men	358.85 1.000	1 Dok u men	50.000 .000	1 Dok u men	1.000. 000.00 0	1 Dok u men	1.000. 000.00 0	1 Dok u men	1.000. 000.00 0	1 Dok u men	1.000. 000.00 0	1 Dok u men	4.050.0 00.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a	DIY	

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat	Dat a Cap a ian pad a Tah u n Aw al	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng-	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

				an	Per e nca n aan															jawa b		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			an Sumber Daya Indust ri	Pembangunan Sumber Daya Industri																ganga n		
		3.31.02 .1.01.0 4	Koordinas i, Sinkronisa si , dan Pelaksana a n Pembang un an Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri	1 Do ku me n	1 Doku men	6.717. 077.60 0	1 Dok u men	455.95 7.600	1 Dok u men	550.00 0.000	1 Dok u men	600.00 0.000	1 Dok u men	650.00 0.000	1 Dok u men	700.00 0.000	1 Dok u men	2.955.9 57.600	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.31.02 .1.01.0 5	Koordinas i, Sinkronisa si , dan Pelaksana a n Pemberda y aan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarak at	4 Do ku me n	4 Doku men	4.116. 368.80 0	4 Dok u men	9.236. 977.15 0	4 Dok u men	2.000. 000.00 0	4 Dok u men	2.000. 000.00 0	4 Dok u men	2.000. 000.00 0	4 Dok u men	2.000. 000.00 0	4 Dok u men	17.236. 977.15 0	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			Pelaksana an pengawas an Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawas	Obyek	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	573.36 1.500	10	3.000.0 00	10	3.000.0 00	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
			Penyusun an Rencana Pembangu nan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembanguna n Industri	Doku men	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	57.036. 450	1	57.036. 450	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.31.03	PROGRA M PENGEN DA LIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaa n Industri yang Berizin	15.5 4 3 Per us aha an	15.5 43 Peru saha an	0	n/a	0	16.5 43 Per u sah a an	20.000 .000	17.04 3 Peru s ahaa n	20.000 .000	17.5 43 Per u sah a an	20.000 .000	18.04 3 Per us ahaa n	20.000 .000	18.0 43 Per u sah a an	80.000. 000	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Tetap
Tuj u	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capa ian pad a Tah	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					Unit Kerj a Pera ngka t Daer	Lokasi				
							Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)							

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

an			n	Kegiatan (output), dan subkegiatan	u n Awa l Pere ncan aan	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	ah Pena nggu ng- jawa b		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3.31.03 .1.01	Penerbit an Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa n Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenanga n Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	35%	35%	0	36%	0	37%	20.000 .000	38%	20.000 .000	39%	20.000 .000	40%	20.000 .000	40%	80.000. 000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.31.03 .1.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas	na	na	0	na	0	1 Dok u men	10.000 .000	1 Dok u men	10.000 .000	1 Dok u men	10.000 .000	1 Dok u men	10.000 .000	4 Dok u men	40.000. 000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
--	--	-------------------------	---	--	----	----	---	----	---	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------------------------	-----	--

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi																		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	na	na	0	na	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.31.04	PROGRA M PENGELO LA AN SISTEM INFORMA SI INDUSTRI NASIONA L	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	410 peru s ahaa n	410 per u sah a an	235.1 1 6.750	365 per u sah a an	104.4 8 3.40 0	600 per u sah a an	120.0 0 0.00 0	700 peru s ahaa n	140.0 0 0.000	800 per u sah a an	160.0 0 0.00 0	900 Per us ahaa n	180.0 0 0.00 0	900 Per u sah a an	704.4 8 3.40 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Tetap
--	--	---------	--	---	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	--	-------

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3.31.04 .1.01	Penyediaa n Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenan ga n Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampinga n pengumpulan data SIINAS	400 orang	400 ora n g	235.11 6.750	125 ora n g	104.48 3.400	200 ora n g	120.00 0.000	200 orang	140.00 0.000	200 ora n g	160.00 0.000	200 orang	180.00 0.000	925 ora n g	704.48 3.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.31.04 .1.01.0 1	Fasilitasi Pengump ul an, Pengolah an dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 Dok u men	1 Dok u men	235.11 6.750	1 Dok u men	104.48 3.400	1 Dok u men	120.00 0.000	1 Dok u men	140.00 0.000	1 Dok u men	160.00 0.000	1 Dok u men	180.00 0.000	1 Dok u men	704.48 3.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
--	--	-------------------------	--	---	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--	-----	--

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			Nasional (SIINas)																			
		4.01.10	PROGRA M PENYELE NG GARAAN KEISTIM EW AAN URUSAN KELEMB AG AAN DAN KETATAL AK SANAAN	Persentase capaian implement asi inovasi layanan publik	n/a	n/a	0	n/a	0	60%	350.0 0 0.00 0	75%	50.000 .000	85%	50.000 .000	100%	50.000 .000	100 %	500.0 0 0.00 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Tetap
		4.01.10 .5.02	Peningkat a n Budaya Pemerint ah an	Tercapainya implementa si budaya pemerintah an	0	0	0	0	0	100%	350.00 0.000	100%	50.000 .000	100%	50.000 .000	100%	50.000 .000	100%	500.00 0.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		
		4.01.10 .5.02.0 1	Implemen ta si Budaya Pemerinta h an DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementa si Budaya Pemerintah an DIY	0	0	0	0	0	1	350.00 0.000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	4	500.00 0.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Menin g katny a tata kelola penye le nggar aa n urusa n pemer i ntah di Peran g kat Daerah			Kategori RB Perangka t Daerah	A (88,67)	A (88,67)		A (88,67)		A(88,67)		A(88,6 7)		A (88,67)		A (88,67)		A (88,67)		Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Target Semula
				Kategori RB Perangka t Daerah	n/a	n/a		n/a		n/a		A (95,48)		A (95,48)		A (95,5)		A (95,5)		Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		Target menjad i. Penyes uaian dikaren akan capaian tahun n-1 sudah melebi

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

																						hi target tahun n
		0.00.01	PROGRA M PENUNJA N G URUSAN PEMERIN TA HAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Sko r 85	Sko r 85	19.321 .433.2 66	Sko r 85	19.777 .493.1 57	Sko r 85	23.418 .250.0 00	Sko r 85	25.480 .035.0 00	Sko r 85	27.755 .348.5 00	Sko r 85	29.079 .848.5 00	Sko r 85	125.51 0.975.1 57	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		
		0.00.01 .1.01	Perencan aa n, Pengangg ar an, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Terlaksanan ya Perencanaa n, Penganggra n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%	100%	141.97 7.000	100%	75.540 .400	100%	98.000 .000	100%	122.00 0.000	100%	148.00 0.000	100%	172.50 0.000	100%	616.04 0.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		
		0.00.01 .1.01.0 1	Penyusun an Dokumen Perencana a n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	4 Dok u men	4 Dok u men	102.56 9.000	4 Dok u men	36.098 .000	4 Dok u men	50.000 .000	4 Dok u men	65.000 .000	4 Dok u men	80.000 .000	4 Dok u men	95.000 .000	4 Dok u men	326.09 8.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perda	DIY	

					Data	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi	Unit		
--	--	--	--	--	------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																				gangan		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	11.715.000	4 Dokumen	15.940.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	125.940.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	27.693.000	3 Laporan	23.502.400	3 Laporan	28.000.000	3 Laporan	32.000.000	3 Laporan	38.000.000	3 Laporan	42.500.000	3 Laporan	164.002.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15.624.458.724	100%	16.557.934.407	100%	17.704.830.000	100%	18.723.115.000	100%	19.742.428.500	100%	20.248.428.500	100%	92.976.736.407	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang / Bulan	126 Orang / Bulan	15.541.978.724	119 Orang / Bulan	16.463.415.407	124 Orang / Bulan	17.500.000.000	129 Orang / Bulan	18.500.000.000	134 Orang / Bulan	19.500.000.000	139 Orang / Bulan	20.000.000.000	139 Orang / Bulan	91.963.415.407	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		0.00.01 .1.02.0 2	Penyedia an Administ ras i Pelaksana a n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	1 Dok u men	102.85 0.000	1 Dok u men	113.13 5.000	1 Dok u men	124.44 8.500	1 Dok u men	124.44 8.500	4 Dok u men	464.88 2.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

																				gang a n		
		0.00.01 .1.02.0 3	Pelaksana a n Penatausa h aan dan Pengujian /V erifikasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuang an SKPD	12 Dok u men	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	70.980 .000	12 Dok u men	354.90 0.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.02.0 5	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo r an	1 Lap o ran	6.000. 000	1 Lap o ran	11.764 .100	1 Lap o ran	17.000 .000	1 Lapo r an	22.000 .000	1 Lap o ran	27.000 .000	1 Lapo r an	30.000 .000	1 Lap o ran	107.76 4.100	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.02.0 7	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se mesteran SKPD	18 Lapo r an	18 Lap o ran	5.500. 000	18 Lap o ran	11.774 .900	18 Lap o ran	14.000 .000	18 Lapo r an	17.000 .000	18 Lap o ran	20.000 .000	18 Lapo r an	23.000 .000	18 Lap o ran	85.774. 900	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a	DIY	

					Data	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi	Unit		
--	--	--	--	--	------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Triwulanan / Semester an SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD																gangan		
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	40.320.000	100%	43.115.000	100%	45.000.000	100%	47.000.000	100%	49.000.000	100%	50.000.000	100%	234.115.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	40.320.000	13 Laporan	43.115.000	13 Laporan	45.000.000	13 Laporan	47.000.000	13 Laporan	49.000.000	13 Laporan	50.000.000	13 Laporan	234.115.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	604.171.000	100%	428.179.300	100%	620.890.000	100%	637.890.000	100%	655.890.000	100%	662.890.000	100%	3.005.739.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
--	--	------------------	------------------------------------	---	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	---------------	-------------------------------------	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	6.108.000	17 Paket	27.678.100	17 Paket	30.000.000	17 Paket	33.000.000	17 Paket	37.000.000	17 Paket	40.000.000	17 Paket	167.678.100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	52.475.000	1 Paket	51.184.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	54.000.000	1 Paket	56.000.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	271.184.000	Dinas Perindustrian dan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			Kantor	yang Disediakan																Perd a gang a n		
		0.00.01 .1.06.0 3	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67.598 .000	1 Paket	28.610 .400	1 Paket	30.000 .000	1 Paket	32.000 .000	1 Paket	34.000 .000	1 Paket	36.000 .000	1 Paket	160.61 0.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.06.0 4	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.303. 000	4 Paket	7.203. 000	4 Paket	7.203. 000	4 Paket	7.203. 000	4 Paket	7.203. 000	4 Paket	7.203. 000	4 Paket	36.015. 000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.06.0 5	Penyedia an Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an	21 Paket	21 Paket	70.000 .000	21 Paket	67.620 .000	21 Paket	100.00 0.000	21 Paket	110.00 0.000	21 Paket	120.00 0.000	21 Paket	120.00 0.000	21 Paket	517.62 0.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perda	DIY	

Tuj u	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capa ian pad a Tah	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerj a Pera ngka t Daer	Lokasi	
							Tahun ke- 1 (2023)	Tahun ke- 2 (2024)	Tahun ke- 3 (2025)	Tahun ke- 4 (2026)	Tahun ke- 5 (2027)				

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

an			n	Kegiatan (output), dan subkegiatan	u n Awa l Pere ncan aan	tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	ah Pena nggu ng- jawa b		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pengganda an	yang Disediakan																ganga n		
		0.00.01 .1.06.0 6	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- Undanga n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dok u men	2 Dok u men	17.100 .000	2 Dok u men	7.468. 800	2 Dok u men	17.100 .000	2 Dok u men	17.100 .000	2 Dok u men	17.100 .000	2 Dok u men	17.100 .000	2 Dok u men	75.868. 800	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.06.0 9	Penyeleng g a raan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga ra an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapo r an	1 Lap o ran	264.93 7.000	1 Lap o ran	160.72 9.000	1 Lap o ran	264.93 7.000	1 Lapo r an	264.93 7.000	1 Lap o ran	264.93 7.000	1 Lapo r an	264.93 7.000	1 Lap o ran	1.220.4 77.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.06.1 1	Dukung an Pelaksana a n Sistem Pemerint ah an Berbasis Elektroni k pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok u men	1 Dok u men	119.65 0.000	1 Dok u men	77.686 .000	1 Dok u men	119.65 0.000	1 Dok u men	119.65 0.000	1 Dok u men	119.65 0.000	1 Dok u men	119.65 0.000	1 Dok u men	556.28 6.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	606.530.000	100%	117.811.300	100%	2.257.030.000	100%	2.872.030.000	100%	3.597.030.000	100%	3.912.030.000	100%	12.755.931.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah																gangan		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01 .1.07.0 2	Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	2 Unit	500.00 0.000	2 Unit	600.00 0.000	2 Unit	800.00 0.000	2 Unit	800.00 0.000	2 Unit	2.700.0 00.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.07.0 5	Pengada an Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	na	na	0	na	0	1 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	7 Paket	200.00 0.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.07.0 6	Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	324.50 0.000	13 Unit	117.81 1.300	13 Unit	125.00 0.000	13 Unit	140.00 0.000	13 Unit	165.00 0.000	13 Unit	180.00 0.000	13 Unit	727.81 1.300	Dinas Perin d ustri a n dan Perda	DIY	

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																				gangan		
		0.00.01 .1.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	na	0	na	0	1 Dokumen	700.00 0.000	1 Dokumen	700.00 0.000	1 Dokumen	700.00 0.000	1 Dokumen	500.00 0.000	4 Dokumen	2.600.0 00.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	na	0	na	0	2 Unit	100.00 0.000	2 Unit	100.00 0.000	2 Unit	100.00 0.000	2 Unit	100.00 0.000	8 Unit	400.00 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	282.03 0.000	18 Unit	0	18 Unit	282.03 0.000	18 Unit	282.03 0.000	18 Unit	282.03 0.000	18 Unit	282.03 0.000	18 Unit	1.128.1 20.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	1.645. 061.20 0	100%	2.110. 556.20 0	100 %	2.330. 000.00 0	100%	2.640. 000.00 0	100 %	3.050. 000.00 0	100%	3.460. 000.00 0	100%	13.590. 556.20 0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

				n Daerah																a gang a n		
Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		0.00.01 .1.08.0 2	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapo r an	3 Lap o ran	621.80 2.000	3 Lap o ran	897.56 5.000	3 Lap o ran	1.000. 000.00 0	3 Lapo r an	1.200. 000.00 0	3 Lap o ran	1.500. 000.00 0	3 Lapo r an	1.800. 000.00 0	3 Lap o ran	6.397.5 65.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.08.0 4	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lapo r an	4 Lap o ran	1.023. 259.20 0	4 Lap o ran	1.212. 991.20 0	4 Lap o ran	1.330. 000.00 0	4 Lapo r an	1.440. 000.00 0	4 Lap o ran	1.550. 000.00 0	4 Lapo r an	1.660. 000.00 0	4 Lap o ran	7.192.9 91.200	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01 .1.09	Pemeliha ra an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah an Daerah	Terlaksanan y a Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100%	100 %	658.91 5.342	100 %	444.35 6.550	100 %	362.50 0.000	100%	438.00 0.000	100 %	513.00 0.000	100%	574.00 0.000	100%	2.331.8 56.550	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		
		0.00.01 .1.09.0 1	Penyedia an Jasa Pemeliha ra an, Biaya Pemeliha ra an dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	25.183 .000	1 Unit	29.333 .400	1 Unit	33.500 .000	1 Unit	38.000 .000	1 Unit	42.000 .000	1 Unit	47.000 .000	1 Unit	189.83 3.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi		
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)							
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Perorangan Dinas atau Kendara an Dinas	Dibayarkan Pajaknya																			

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			Jabatan																			
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	56.619.200	19 Unit	33.940.000	19 Unit	45.000.000	19 Unit	60.000.000	19 Unit	75.000.000	19 Unit	90.000.000	19 Unit	303.940.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	na	0	na	0	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	8 Unit	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	38 Unit	38 Unit	244.958.550	26 Unit	308.238.750	28 Unit	120.000.000	30 Unit	135.000.000	32 Unit	150.000.000	34 Unit	160.000.000	34 Unit	873.238.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Dinas Operasion al atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																		
		0.00.01 .1.09.0 5	Pemeliha ra an Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	6.565. 000	3 Unit	0	3 Unit	9.000. 000	3 Unit	10.000 .000	3 Unit	11.000 .000	3 Unit	12.000 .000	3 Unit	42.000. 000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		0.00.01 .1.09.0 6	Pemeliha ra an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	42.890 .000	19 Unit	25.844 .400	19 Unit	35.000 .000	19 Unit	45.000 .000	19 Unit	55.000 .000	19 Unit	65.000 .000	19 Unit	225.84 4.400	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		0.00.01 .1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	282.69 9.592	2 Unit	47.000 .000	2 Unit	70.000 .000	2 Unit	100.00 0.000	2 Unit	130.00 0.000	2 Unit	150.00 0.000	2 Unit	497.00 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
				Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,29 %	8,29 %		8,34 %		8,39 %		8,44 %		8,49 %		8,54 %		8,54 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Menin g katny a nilai perda g angan dalam neger i dan luar nege ri			Laju pertumbuh an Perdagang an dalam PDRB	5,22 %	5,22 %		n/a		5,32 %		5,38 %		5,43 %		5,49 %		5,49 %		Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		
				Nilai Ekspor Tahun n	US \$ 57 3 Juta	US \$ 57 3 Juta		US \$ 63 0 Juta		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
		3.30.02	PROGRA M PERIZINA N DAN PENDAFT A RAN	Jumlah Perusaha an Ekspor	485 peru s ahaa n	485 per u sah a an	46.483 .000	515 per u sah a an	29.788 .700	545 per u sah a an	35.000 .000	575 peru s ahaa n	40.000 .000	605 per u sah a an	45.000 .000	635 per us ahaa n	50.000 .000	635 per u sah a an	199.7 8 8.70 0	Dina s Peri nd ustri a n		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			PERUSA HA AN																	dan Perd a gang a n		
		3.30.02 .1.04	Penerbita n Surat Keteranga n Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapka n Sebagai	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	90 %	90 %	46.483 .000	92 %	29.788 .700	94 %	35.000 .000	96 %	40.000 .000	98 %	45.000 .000	99 %	50.000 .000	99 %	199.78 8.700	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Instansi Penerbi t SKA dan Angka Pengen al Importi r																			

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

			(API)																			
		3.30.02 .1.04.0 1	Koordinas i dan Sinkronisa si Layanan Penerbita n SKA	Jumlah Dokumen Penerbita n Surat Keterang an Asal	17.00 0 Dok u men	17.00 0 Dok u men	46.483 .000	24.90 0 Dok u men	29.788 .700	26.90 0 Dok u men	35.000 .000	27.50 0 Dok u men	40.000 .000	28.50 0 Dok u men	45.000 .000	30.00 0 Dok u men	50.000 .000	137.8 00 Dok u men	199.78 8.700	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.30.04	PROGRA M STABILIS ASI HARGA BARANG Kebutuh an POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaa n data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %	4.650. 384.75 0	n/a	624.8 8 3.90 0	90 %	685.0 0 0.00 0	90 %	743.0 0 0.000	90 %	801.0 0 0.00 0	90 %	834.0 0 0.00 0	90 %	3.687. 8 83.90 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		
				Inflasi Pangan Bergejolak	2,22%	2,22 %		2,21 %		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
		3.30.04 .1.02	Pengendal ia n Harga, Informasi Ketersedi aa n Stok Barang Kebutuha n Pokok dan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	4.650. 384.75 0	25	624.88 3.900	25	685.00 0.000	25	743.00 0.000	25	801.00 0.000	25	834.00 0.000	25	3.687.8 83.900	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		

					Data	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi	Unit		
--	--	--	--	--	------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																			

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.30.04 .1.02.0 1	Pemantau a n Harga dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupate n/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	1 Lapo r an	1 Lap o ran	44.577 .000	1 Lap o ran	52.613 .300	1 Lap o ran	60.000 .000	1 Lapo r an	68.000 .000	1 Lap o ran	76.000 .000	1 Lapo r an	84.000 .000	5 Lap o ran	340.61 3.300	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp	targ e t	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.30.04 .1.02.0 2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampakn ya Beberapa Daerah Kabupate n/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Lapo r an	1 Lap o ran	4.605. 807.75 0	1 Lap o ran	572.27 0.600	1 Lap o ran	625.00 0.000	1 Lapo r an	675.00 0.000	1 Lap o ran	725.00 0.000	1 Lapo r an	750.00 0.000	5 Lap o ran	3.347.2 70.600	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.30.05	PROGRA M PENGEM BA NGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	16 %	16 %	2.666. 005.80 0	17 %	130.2 1 2.00 0	20 %	960.0 0 0.00 0	20 %	990.0 0 0.000	20 %	1.040. 000.00 0	20 %	1.070. 000.00 0	20 %	4.190. 2 12.00 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		
		3.30.05 .1.01	Penyeleng g arian Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	256	256	2.666. 005.80 0	230	130.21 2.000	371	960.00 0.000	427	990.00 0.000	470	1.040. 000.00 0	517	1.070. 000.00 0	2015	4.190.2 12.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi																			
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	na	na	0	na	0	105 Pelaku Usaha	700.000.000	119 Pelaku Usaha	700.000.000	127 Pelaku Usaha	700.000.000	139 Pelaku Usaha	700.000.000	490 Pelaku Usaha	2.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor	na	na	2.350.991.800	na	0	6 Pelaku Usaha	110.000.000	8 Pelaku Usaha	120.000.000	8 Pelaku Usaha	150.000.000	8 Pelaku Usaha	160.000.000	30 Pelaku Usaha	540.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

				Unggulan																gang a n		
		3.30.05 .1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	90 Pela k u Usah a	90 Pela k u Usah a	315.01 4.000	230 Pela k u Usah a	130.21 2.000	260 Pela k u Usah a	150.00 0.000	300 Pelak u Usah a	170.00 0.000	335 Pela k u Usah a	190.00 0.000	370 Pela k u Usah a	210.00 0.000	1.495 Pela k u Usah a	850.21 2.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
		3.30.06	PROGRA M STANDA RDI SASI DAN PERLINDU N	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai	95 %	95 %	719.9 6 9.000	n/a	283.3 3 6.30 0	96 %	306.0 0 0.00 0	96,5 %	330.0 0 0.000	97 %	354.0 0 0.00 0	97,5 %	378.0 0 0.00 0	97,5 %	1.651. 3 36.30 0	Dina s Peri nd ustri a n dan		

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			GAN KONSU ME N	dengan Standard																Perda gang a n		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

				Persentase penanganan sengketa konsumen	94%	94%		n/a		96 %		97 %		98 %		99 %		99 %				
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,22%	2,22 %		2,21 %		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45	45	412.746.000	35	261.334.300	30	280.000.000	25	300.000.000	20	320.000.000	15	340.000.000	125	1.501.334.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45 Pengaduan	45 Pengaduan	412.746.000	35 Pengaduan	261.334.300	30 Pengaduan	280.000.000	25 Pengaduan	300.000.000	20 Pengaduan	320.000.000	15 Pengaduan	340.000.000	125 Pengaduan	1.501.334.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	307.223.000	25	22.002.000	25	26.000.000	25	30.000.000	25	34.000.000	25	38.000.000	25	150.002.000	Dinas Perindustrian dan		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota																	Perdagangan		
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	307.223.000	1 Laporan	22.002.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	34.000.000	1 Laporan	38.000.000	1 Laporan	150.002.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.30.07	PROGRA M PENGGU NA AN DAN PEMASA RA N PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagang an yang Dibina	Rp. 2,48 Mily a r	Rp. 2,4 8 Mil y ar	1.606. 452.25 0	Rp. 2,6 3 Mil y ar	1.775. 000.00 0	Rp. 2,6 4 Mil y ar	1.250. 000.00 0	Rp. 2,65 Milyar	1.250. 000.00 0	Rp. 2,6 8 Mil y ar	1.250. 000.00 0	Rp. 2,74 Mily a r	1.250. 000.00 0	Rp. 2,7 4 Mil y ar	6.775. 0 00.00 0	Dina s Peri nd ustri a n dan Perd a gang a n		
		3.30.07 .1.02	Pelaksan aa n Pemasar an Pengguna	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	20 IKM	20 IKM	1.606. 452.25 0	0	1.775. 000.00 0	50	1.250. 000.00 0	55	1.250. 000.00 0	60	1.250. 000.00 0	65	1.250. 000.00 0	65	6.775.0 00.000	Dinas Perin d ustri a n dan		

Tuj u an	Sasar a n	Kode	Progra m dan Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiat an	Data Capa ian pad a Tah u n Awa l Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lokasi	
								Tahun ke- 1 (2023)		Tahun ke- 2 (2024)		Tahun ke- 3 (2025)		Tahun ke- 4 (2026)		Tahun ke- 5 (2027)						
						tar g et	Rp	tar g et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp	targ et	Rp	tar g et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			n Produk Dalam Negeri																	Perda gang a n		

PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027

		3.30.07 .1.02.0 1	Fasilitasi Pemasar an Penggun aa n Produk Dalam Negeri Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	760 UM K M	760 UM K M	1.606. 452.25 0	1090 UM K M	1.775. 000.00 0	300 UM K M	1.250. 000.00 0	350 UM K M	1.250. 000.00 0	400 UM K M	1.250. 000.00 0	450 UM K M	1.250. 000.00 0	2590 UM K M	6.775.0 00.000	Dinas Perin d ustri a n dan Perd a gang a n	DIY	
Total							57.505 .771.7 16		52.432 .834.2 07		44.654 .250.0 00		53.643 .035.0 00		57.125 .348.5 00		59.111 .848.5 00		266.96 7.316.2 07			

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan bidang industri dan perdagangan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja ini merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4-2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	%	12,05	12,10 %	12,15	11,89-12,20	11,97-12,25 %	12,06-12,30	
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	%	0,99	n/a	2,50	3,7	3,8	4,00	
3	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. Juta/Orang	33	34	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Kategori RB Perangkat Daerah	Poin	A (88,67)	A (88,67)	A(88,67)	A(95,48)	A(95,49)	A(95,5)	
5	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	%	8,29	8,34	8,39	8,44	8,49	8,54	
6	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	%	5,22	n/a	5,32	5,38	5,43	5,49	
7	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ Juta	573	US\$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	

Tabel 4-3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	UU	410	365	600	700	800	900	
2	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	16%	17%	20%	20%	20%	20%	
3	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	UU	15.553	n/a	16.543	17.043	17.543	18.043	
4	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp. Miliar	2,48	2,63	2,64	2,65	2,68	2,74	
5	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	85	85	85	85	85	85	
6	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	n/a	n/a	60	75	85	100	
7	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Triliun	12,80	n/a	13,38	13,78	14,27	14,84	
9	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	n/a	n/a	1	2	3	3	
10	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	387.000	412.000	413.000	414.000	414.000	415.000	
11	Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	485	515	545	575	605	635	
12	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	90	n/a	90	90	90	90	
13	Persentase Jumlah Barang Jasa yang	%	95	n/a	96	96,50	97	97,5	

Tabel 4-4
Tabel Dukungan PD terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Melanjutkanilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.								
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional /Nasional	0	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3			Peningkatan Citra Produk Ekspor	0	0		106.982.600	0	0
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	0	0	0	0	9	67.000.000
5			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.116.368.800	9.236.977.150	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustria	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	n yang menjadi kewenangan Provinsi						

Tabel 4-5 Tabel Dukungan PD Program Prioritas Presiden									
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi									
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan n Pembangunan an Sumber Daya Industri	358.85 1.000	50.000 .000	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan n Pembangunan an Sarana dan Prasarana Industri	6.717. 077.60 0	455.95 7.600	550.00 0.000	600.00 0.000	650.0 0 0.000	700.00 0.000
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan n Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.116. 368.80 0	9.236. 977.15 0	2.000. 000.00 0	2.000. 000.00 0	2.000. 000.00 0	2.000. 000.00 0
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	573.36 1.500	3.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunanan Industri Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57.036.450

Tabel 4-6 Dukungan PD Kegiatan Prioritas Utama									
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya									
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan n Pembangunan Sumber Daya Industri	358.85 1.000	50.000 .000	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0
			Koordinasi, Sinkronisasi	6.717. 077.60	455.95 7.600	550.00 0.000	600.00 0.000	650.0 0	700.00 0.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			, dan Pelaksanaa n Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0				0.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.116.368.800	9.236.977.150	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	573.361.500	3.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57.036.450

Tabel 4-7

Dukungan PD terhadap Program Strategis Nasional

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi									
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangunan Sumber Daya Industri	358.851.000	50.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6.717.077.600	455.957.600	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.116.368.800	9.236.977.150	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	573.361.500	3.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57.036.450

Tabel 4-8

Dukungan PD terhadap Proyek Strategis Nasional

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Industrialisasi dan Hilirisasi									
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangunan Sumber Daya Industri	358.851.000	50.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi	6.717.077.60	455.957.600	550.000.000	600.000.000	650.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			, dan Pelaksanaa n Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0				0.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.116.368.800	9.236.977.150	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	573.361.500	3.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57.036.450
Pengendalian Inflasi									
	PROGRAM STABILISA SI HARGA BARANG Kebutuha n POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendal ia n Harga, Informasi Ketersedi aa n Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupate n/ Kota yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagangan an	Pemantau n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	44.577.000	52.613.300	60.000.000	68.000.000	76.000.000	84.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.605.807.750	572.270.600	625.000.000	675.000.000	725.000.000	750.000.000

Tabel 4-9
Dukungan PD terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil								
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten /Kota	44.577.000	52.613.300	60.000.000	68.000.000	76.000.000	84.000.000
3			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga	4.605.807.750	572.270.600	625.000.000	675.000.000	725.000.000	750.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 merupakan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027 serta kebijakan kementerian teknis. Selain itu, Renstra Disperindag DIY disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian makro serta berbagai tantangan dan permasalahan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Mengingat besarnya kontribusi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di DIY, sektor ini harus terus dikembangkan secara berkelanjutan.

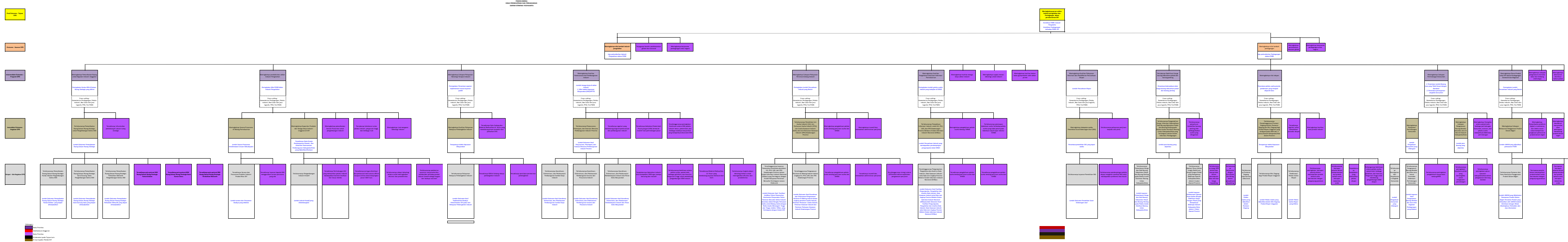
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, Renstra ini dijabarkan secara konkret ke dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah, terkoordinasi, serta berbasis pada pengoptimalan potensi daerah. Tujuannya adalah agar pelaku usaha industri dan perdagangan di DIY menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi. Pengembangan sektor ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga masyarakat yang memiliki visi serupa. Oleh karena itu, sinergisitas antar pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat krusial.

Melalui Renstra ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan diharapkan dapat menjadi lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

CASCADING TAHUN 2022-2027																																		
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta																																		
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																																		
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah											
													Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)													
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)										
1) Meningkatkan kualitas hidup; kehidupan; penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup; kehidupan; penghidupan masyarakat	IGI (Inclusive Growth Index)	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	Terwujudnya daya saling sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya industri pengolahan			5.15		4,9-5,4		5,1-5,6		5,3-5,8		5,5-6,0		5,7-6,2		5,7-6,2											
									Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		12.05%		12.10%		12.15%		11,89%-12,2%		11,97%-12,25%		12,06%-12,3%		12,06%-12,3%											
									Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB		0.99%		n/a		2.50%		3.70%		3.80%		4.10%		4.10%											
									Produktivitas tenaga kerja industri		Rp. 33 Juta/Oran		Rp. 34 Juta/Orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a											
									PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		n/a	0	n/a	0	1 Sentra	1,000,000,000	2 Sentra	1,500,000,000	3 Sentra	2,000,000,000	3 Sentra	2,000,000,000	9 Sentra	6,500,000,000										
									Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		0	0	0	0	1 Dokumen	1,000,000,000	2 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	2,000,000,000	3 Dokumen	2,000,000,000	9 Dokumen	6,500,000,000										
									Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	1,500,000,000		3,000,000,000										
									Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu		0	0	0	0	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	0	0		2,000,000,000										
									Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh		n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000		1,500,000,000										
									PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. 12,80 Triliun	17,067,629,500	n/a	19,964,702,000	Rp. 13,38 Triliun	12,960,000,000	Rp. 13,78 Triliun	19,500,000,000	Rp. 14,27 Triliun	20,000,000,000	Rp. 14,84 Triliun	20,500,000,000	Rp. 14,84 Triliun	109,992,331,500									
									Nilai Produksi IKM Industri Kreatif		6,6 Trilyun		6,8 Trilyun		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a											
									Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			0		0		1,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		19,000,000,000										
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	na	0	na	0	1	1,000,000,000	2	6,000,000,000	2	6,000,000,000	2	6,000,000,000		19,000,000,000									
									Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	3950 IKM	17,067,629,500	6.145 IKM	19,964,702,000	6.200 IKM	11,960,000,000	6.300 IKM	13,500,000,000	6.400 IKM	14,000,000,000	6.500 IKM	14,500,000,000	31.545 IKM	90,992,331,500									
									Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	3950 Unit	17,067,629,500	6145 Unit	19,964,702,000	6200 Unit	11,960,000,000	6300 Unit	13,500,000,000	6400 Unit	14,000,000,000	6500 Unit	14,500,000,000		90,992,331,500									
									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	387.210 Orang	11,192,297,400	412.630 Orang	9,742,934,750	413.500 Orang	3,550,000,000	414.000Orang	3,600,000,000	414.500 Orang	3,650,000,000	415.000Orang	3,700,000,000	415.000 Orang	35,435,232,150									
									Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG			79.08%		n/a		84.00%		86.50%		89.00%		89.50%		89.50%										
									Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	6 Dokumen	11,192,297,400	3 Dokumen	9,742,934,750	3 Dokumen	3,550,000,000	3 Dokumen	3,600,000,000	3 Dokumen	3,650,000,000	3 Dokumen	3,700,000,000	3 Dokumen	35,435,232,150									
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	358,851,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000		4,408,851,000									
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	6,717,077,600	1 Dokumen	455,957,600	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	700,000,000		9,673,035,200									
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4,116,368,800	4 Dokumen	9,236,977,150	4 Dokumen	2,000,000,000	4 Dokumen	2,000,000,000	4 Dokumen	2,000,000,000	4 Dokumen	2,000,000,000		21,353,345,950									
									Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Jawa Barat		Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Objek	573,361,500	10 Objek	3,000,000	10 Objek	3,000,000							
									Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	57,036,450	1 Dokumen	57,036,450									
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	15.543 Perusahaan	0	n/a	0	16.543 Perusahaan	20,000,000	17.043 Perusahaan	20,000,000	17.543 Perusahaan	20,000,000	18.043 Perusahaan	20,000,000	18.043 Perusahaan	80,000,000									
									Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	35%	0	36%	0	37%	20,000,000	38%	20,000,000	39%	20,000,000	40%	20,000,000	40%	80,000,000									
									Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1) Industri Besar; dan 2) Industri kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota; 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah (Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:	na	0	na	0	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000		40,000,000									
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	na	0	na	0	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000		40,000,000									
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	410 perusahaan	235,116,750	365 perusahaan	104,483,400	600 perusahaan	120,000,000	700 perusahaan	140,000,000	800 perusahaan	160,000,000	900 Perusahaan	180,000,000	900 Perusahaan	939,600,150									
									Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAs	400 orang	235,116,750	125 orang	104,483,400	200 orang	120,000,000	200 orang	140,000,000	200 orang	160,000,000	200 orang	180,000,000	925 orang	939,600,150									
									Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	235,116,750	1 Dokumen	104,483,400	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	180,000,000		939,600,150									
									PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	0	n/a	0	60%	350,000,000	75%	50,000,000	85%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	500,000,000									
									Peningkatan Budaya Pemerintahan		Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	0	0	0	0	100%	350,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	500,000,000									
									Implementasi Budaya Pemerintahan DIY		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	0	0	0	0	1	350,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		500,000,000									
									Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah									Kategori RB Perangkat Daerah		A		A		A		A		A		A		A		
																		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKPI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 85	19,321,433,266	Skor 85	19,777,493,157	Skor 85	23,418,250,000	Skor 85	25,480,035,000	Skor 85	27,755,348,500	Skor 85	29,079,848,500	Skor 85	144,832,408,423
																		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%	141,977,000	100%	75,540,400	100%	98,000,000	100%	122,000,000	100%	148,000,000	100%	172,500,000	100%	758,017,400
																		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	102,569,000	4 Dokumen	36,098,000	4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	65,000,000	4 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	95,000,000		428,667,000
																		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	11,715,000	4 Dokumen	15,940,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	35,000,000		137,655,000
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	27,693,000	3 Laporan	23,502,400	3 Laporan	28,000,000	3 Laporan	32,000,000	3 Laporan	38,000,000	3 Laporan	42,500,000		191,695,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15,624,458,724	100%	16,557,934,407	100%	17,704,830,000										100%	18,723,115,000	100%	19,742,428,500	100%	20,248,428,500	100%	108,601,195,131									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	15,541,978,724	119 Orang/ Bulan	16,463,415,407	124 Orang/ Bulan	17,500,000,000										129 Orang/ Bulan	18,500,000,000	134 Orang/ Bulan	19,500,000,000	139 Orang/ Bulan	20,000,000,000		107,505,394,131									

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
													Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	1 Dokumen	102,850,000	1 Dokumen	113,135,000	1 Dokumen	124,448,500	1 Dokumen	124,448,500		464,882,000	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	70,980,000	12 Dokumen	70,980,000	12 Dokumen	70,980,000	12 Dokumen	70,980,000	12 Dokumen	70,980,000	12 Dokumen	70,980,000		425,880,000	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	11,764,100	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	27,000,000	1 Laporan	30,000,000		113,764,100	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5,500,000	18 Laporan	11,774,900	18 Laporan	14,000,000	18 Laporan	17,000,000	18 Laporan	20,000,000	18 Laporan	23,000,000		91,274,900	
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	40,320,000	100%	43,115,000	100%	45,000,000	100%	47,000,000	100%	49,000,000	100%	50,000,000	100%	274,435,000	
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	40,320,000	13 Laporan	43,115,000	13 Laporan	45,000,000	13 Laporan	47,000,000	13 Laporan	49,000,000	13 Laporan	50,000,000		274,435,000	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	604,171,000	100%	428,179,300	100%	620,890,000	100%	637,890,000	100%	655,890,000	100%	662,890,000	100%	3,609,910,300	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	6,108,000	17 Paket	27,678,100	17 Paket	30,000,000	17 Paket	33,000,000	17 Paket	37,000,000	17 Paket	40,000,000		173,786,100	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52,475,000	1 Paket	51,184,000	1 Paket	52,000,000	1 Paket	54,000,000	1 Paket	56,000,000	1 Paket	58,000,000		323,659,000	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	67,598,000	1 Paket	28,610,400	1 Paket	30,000,000	1 Paket	32,000,000	1 Paket	34,000,000	1 Paket	36,000,000		228,208,400	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,303,000	4 Paket	7,203,000	4 Paket	7,203,000	4 Paket	7,203,000	4 Paket	7,203,000	4 Paket	7,203,000		42,318,000	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	70,000,000	21 Paket	67,620,000	21 Paket	100,000,000	21 Paket	110,000,000	21 Paket	120,000,000	21 Paket	120,000,000		587,620,000	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	17,100,000	2 Dokumen	7,468,800	2 Dokumen	17,100,000	2 Dokumen	17,100,000	2 Dokumen	17,100,000	2 Dokumen	17,100,000		92,968,800	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	264,937,000	1 Laporan	160,729,000	1 Laporan	264,937,000	1 Laporan	264,937,000	1 Laporan	264,937,000	1 Laporan	264,937,000		1,485,414,000	
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	119,650,000	1 Dokumen	77,686,000	1 Dokumen	119,650,000	1 Dokumen	119,650,000	1 Dokumen	119,650,000	1 Dokumen	119,650,000		675,936,000	
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	606,530,000	100%	117,811,300	100%	2,257,030,000	100%	2,872,030,000	100%	3,597,030,000	100%	3,912,030,000	100%	13,362,461,300	
									Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	500,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	2,000,000,000		5,000,000,000	
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	2 Unit	500,000,000	2 Unit	600,000,000	2 Unit	800,000,000	2 Unit	800,000,000		2,700,000,000	
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	na	0	na	0	1 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000		200,000,000	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	324,500,000	13 Unit	117,811,300	13 Unit	125,000,000	13 Unit	140,000,000	13 Unit	165,000,000	13 Unit	180,000,000		1,052,311,300	
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	0	na	0	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	500,000,000		2,600,000,000	
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	0	na	0	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000		400,000,000	
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	282,030,000	18 Unit	0	18 Unit	282,030,000	18 Unit	282,030,000	18 Unit	282,030,000	18 Unit	282,030,000		1,410,150,000	
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,645,061,200	100%	2,110,556,200	100%	2,330,000,000	100%	2,640,000,000	100%	3,050,000,000	100%	3,460,000,000	100%	15,235,617,400	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	621,802,000	3 Laporan	897,565,000	3 Laporan	1,000,000,000	3 Laporan	1,200,000,000	3 Laporan	1,500,000,000	3 Laporan	1,800,000,000		7,019,367,000	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,023,259,200	4 Laporan	1,212,991,200	4 Laporan	1,330,000,000	4 Laporan	1,440,000,000	4 Laporan	1,550,000,000	4 Laporan	1,660,000,000		8,216,250,400	
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	658,915,342	100%	444,356,550	100%	362,500,000	100%	438,000,000	100%	513,000,000	100%	574,000,000	100%	2,990,771,892	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25,183,000	1 Unit	29,333,400	1 Unit	33,500,000	1 Unit	38,000,000	1 Unit	42,000,000	1 Unit	47,000,000		215,016,400	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	56,619,200	19 Unit	33,940,000	19 Unit	45,000,000	19 Unit	60,000,000	19 Unit	75,000,000	19 Unit	90,000,000		360,559,200	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	0	na	0	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000		200,000,000	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	244,958,550	26 Unit	308,238,750	28 Unit	120,000,000	30 Unit	135,000,000	32 Unit	150,000,000	34 Unit	160,000,000		1,118,197,300	
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	6,565,000	3 Unit	0	3 Unit	9,000,000	3 Unit	10,000,000	3 Unit	11,000,000	3 Unit	12,000,000		48,565,000	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	42,890,000	19 Unit	25,844,400	19 Unit	35,000,000	19 Unit	45,000,000	19 Unit	55,000,000	19 Unit	65,000,000		268,734,400	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	282,699,592	2 Unit	47,000,000	2 Unit	70,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	130,000,000	2 Unit	150,000,000		779,699,592	
									Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8.29%		8.34%		8.39%		8.44%		8.49%		8.54%		8.54%		8.54%
										Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5.22%		n/a		5.32%		5.38%		5.43%		5.49%		5.49%		5.49%
										Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta		US\$ 630 Juta		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a
										PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	485 perusahaan	46,483,000	515 perusahaan	29,788,700	545 perusahaan	35,000,000	575 perusahaan	40,000,000	605 perusahaan	45,000,000	635 perusahaan	50,000,000	635 perusahaan	246,271,700
										Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	90%	46,483,000	92%	29,788,700	94%	35,000,000	96%	40,000,000	98%	45,000,000	99%	50,000,000	99%	246,271,700
										Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	17.000 Dokumen	46,483,000	24.900 Dokumen	29,788,700	26.900 Dokumen	35,000,000	27.500 Dokumen	40,000,000	28.500 Dokumen	45,000,000	30.000 Dokumen	50,000,000		246,271,700
										PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90%	4,650,384,750	n/a	624,883,900	90%	685,000,000	90%	743,000,000	90%	801,000,000	90%	834,000,000	90%	8,338,268,650
										Inflasi Pangan Bergejolak		2.22%		2.21%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a	
										Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	4,650,384,750	25	624,883,900	25	685,000,000	25	743,000,000	25	801,000,000	25	834,000,000	25	8,338,268,650
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	44,577,000	1 Laporan	52,613,300	1 Laporan	60,000,000		1 Laporan	68,000,000	1 Laporan	76,000,000	1 Laporan	84,000,000		385,190,300								
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	4,605,807,750	1 Laporan	572,270,600	1 Laporan	625,000,000	1 Laporan		675,000,000	1 Laporan	725,000,000	1 Laporan	750,000,000		7,953,078,350									
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	16%	2,666,005,800	17%	130,212,000	20%	960,000,000	20%		990,000,000	20%	1,040,000,000	20%	1,070,000,000	20%	6,856,217,800									
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	256	2,666,005,800	230	130,212,000	371	960,000,000	427		990,000,000	470	1,040,000,000	517	1,070,000,000	2015	6,856,217,800									
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	na	0	na	0	105 Pelaku Usaha	700,000,000	119 Pelaku Usaha		700,000,000	127 Pelaku Usaha	700,000,000	139 Pelaku Usaha	700,000,000		2,800,000,000									

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
													Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
									Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	na	2,350,991,800	na	0	6 Pelaku Usaha	110,000,000	8 Pelaku Usaha	120,000,000	8 Pelaku Usaha	150,000,000	8 Pelaku Usaha	160,000,000		2,890,991,800
									Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	90 Pelaku Usaha	315,014,000	230 Pelaku Usaha	130,212,000	260 Pelaku Usaha	150,000,000	300 Pelaku Usaha	170,000,000	335 Pelaku Usaha	190,000,000	370 Pelaku Usaha	210,000,000		1,165,226,000
									PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	95%	719,969,000	n/a	283,336,300	96%	306,000,000	96.50%	330,000,000	97%	354,000,000	97.50%	378,000,000	97.50%	2,371,305,300
										Persentase penanganan sengketa konsumen	94%		n/a		96%		97%		98%		99%		99%	
										Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2.22%		2.21%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a	
									Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45	412,746,000	35	261,334,300	30	280,000,000	25	300,000,000	20	320,000,000	15	340,000,000	125	1,914,080,300
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45 Pengaduan	412,746,000	35 Pengaduan	261,334,300	30 Pengaduan	280,000,000	25 Pengaduan	300,000,000	20 Pengaduan	320,000,000	15 Pengaduan	340,000,000		1,914,080,300
									Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	307,223,000	25	22,002,000	25	26,000,000	25	30,000,000	25	34,000,000	25	38,000,000	25	457,225,000
									Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	307,223,000	1 Laporan	22,002,000	1 Laporan	26,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	34,000,000	1 Laporan	38,000,000		457,225,000
									PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp. 2,48 Milyar	1,606,452,250	Rp. 2,63 Milyar	1,775,000,000	Rp. 2,64 Milyar	1,250,000,000	Rp. 2,65 Milyar	1,250,000,000	Rp. 2,68 Milyar	1,250,000,000	Rp. 2,74 Milyar	1,250,000,000	Rp. 2,74 Milyar	8,381,452,250
									Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	20 IKM	1,606,452,250	0	1,775,000,000	50	1,250,000,000	55	1,250,000,000	60	1,250,000,000	65	1,250,000,000	65	8,381,452,250
									Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	760 UMKM	1,606,452,250	1090 UMKM	1,775,000,000	300 UMKM	1,250,000,000	350 UMKM	1,250,000,000	400 UMKM	1,250,000,000	450 UMKM	1,250,000,000		8,381,452,250



Form E.27

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan Data dan Informasi	√			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	√			
7	Perumusan Isu-Isu Strategis	√			
8	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Provinsi	√			
9	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Provinsi Berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√			
10	Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
11	Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur terkait Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	√			
13	Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
14	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	√			

15	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi	√			
16	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi	√			
17	Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Provinsi	√			
18	Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
19	Pentahapan Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan Pentahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang telah disahkan	√			



Yogyakarta, 8 Juni 2026
KEPALA

Yuna Pancawati, S.E., M.Si.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp. : (0274)_512063, 389432 Fax. : (0274)_512063

Surel : disperindag@jogjaprovo.go.id

Laman : disperindag.jogjaprovo.go.id